RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019 - 2024

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266

Sumber 45611

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas rakhmatNyalah penyusunan dokumen Rencana Stategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Renstra merupakan dokumen penting untuk memberikan arah bagi setiap pengelola pendidikan dalam merealisasikan cita-cita mencerdaskan bangsa sesuai komitmen bersama antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Dengan demikian semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah semestinya tetap mengacu pada Renstra tersebut.

Untuk merealisasikan Renstra Dinas Pedidikan Kabupaten Cirebon perlu dukungan dan kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat, karena tanpa adanya dukungan maka akan menemui kesulitan dan kendala yang tidak sedikit.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berisi mengenai pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan yang diuraikan secara ringkas dan jelas agar dapat mudah dipahami untuk dipedomani.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Sumber, 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. Asdullah, SA, MM.
NIP. 19640203 199009 1 001

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai ***usaha sadar dan terencana*** untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Pendidikan beradasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas Sumberdaya Manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi kemasa depan.

Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan managamen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan secarah umum.

Pendidikan dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan juga diarahkan untuk meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknonogi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan diharapkan dapat sinergi antara top-down planning dan bottom up planning.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan pendidikan mendorong Dinas Pendidikan untuk segera mengimplementasikan langkah pelayanan menuju terraihnya target IPM khususnya dibidang pendidikan dengan menyusun dan merumuskan rencana program strategis penyelenggaraan teknis di bidang pendidikan. Untuk maksud tersebut perlu adanya Rencana Strategis bidang Pendidikan yang merupakan penjabaran visi, misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kebijakan Dinas Pendidikan pada periode tahun 2019 - 2024 serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cirebon.

1.2.2 Sasaran

Sasaran penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2019–2024, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7 Seri E.5);

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60 Seri D.9);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri, D.11).
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4).

1.4. KERANGKA PIKIR

Renstra Dinas Pendidikan dirumuskan dengan memperhatikan dokumen perencanaan baik tingkat Provinsi maupun Pusat, kondisi dan potensi serta masukan-masukan dari stakeholders untuk bersama-sama menggagas peningkatan kualitas pendidikan melalui Rapat/pertemuan , rakoor dan serta kegiatan lain dengan tujuan menjaring keinginan-keinginan stakeholders untuk kemudian dianalisis dan diformulasikan kedalam perumusan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan kebijakan Dinas Pendidikan.

Setelah perumusan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan kebijakan disepakati, kemudian dilakukan analisis lingkungan strategis untuk menentukan strategi umum dan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical succes factor/ CSF). CSF ini menjadi acuan dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran serta cara mencapainya yang mencakup kebijakan dan program-program pembangunan Dinas Pendidikan tahun 2019 – 2024.

Agar perumusan tujuan dan sasaran menjadi terukur, dirumuskan indikator kinerja, terutama indikator kinerja pada tingkat sasaran. Indikator kinerja sasaran ini merupakan gambaran prestasi kerja yang akan dicapai dengan pendekatan outcome (hasil) dari program-program bidang kewenangan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan.

1.5. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Renstra, tujuan dan sasaran, landasan hukum penyusunan, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS

Berisi tentang struktur organisasi, funsi dan tugas pokok, kinerja dinas serta karakteristik pendidikan di Kabupaten Cirebon.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menyajikan uraian permasalahan baik internal maupun eksternal serta uraian isu strategis yang dihadapi.

BAB. IV TUJUAN, SASARAN

Berisi tentang penjelasannya tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan lima tahun kedepan.

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan serta arah kebijakan pendidikan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Kerja Dinas Pendidikan

Tugas Pokok dan Fungsi

Fungsi Dinas Pendidikan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan azaz otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan Tugas Pokok Dinas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pendidikan.

Struktur organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

1) Kepala Dinas
2) Sekretariat membawahi:
   a) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
   b) Sub Bagian Keuangan
   c) Sub Bagian Umum
3) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Membawahi:
   a) Seksi Kurikulum
   b) Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset
   c) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
4) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   a) Seksi Kurikulum
   b) Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset
   c) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
   a) Seksi Kurikulum
   b) Seksi Sarana prasarana, aset dan data PAUD
   c) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
6) Bidang Pendidikan Non Formal
   a) Seksi Kurikulum
   b) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan
   c) Kursus dan Kelembagaan

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan unsur Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diberi tanggungjawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon sesuai peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 Seri D 13 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 5 (lima) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang serta 15 orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang kasubbag, dan 12 (dua belas) orang Kasi.

2.3. Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon meliputi pelayanan pendidikan terhadap seluruh anak usia sekolah mulai dari Pendidikan Usia Dini, SD, SMP, dan pendidikan non formal melalui Paket A, B, C, Keaksaraan Fungsional serta lembaga kursus.

Agar anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan sesuai haknya, pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bea siswa dan lain-lain. Sedangkan untuk pemenuhan tenaga pendidik dipenuhi melalui penangangkatan CPNS serta penunjukkan guru honorer menggunakan dana BOS sesuai juknis yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengenai kebutuhan sarana prasarana dipenhi melalui dana Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain, dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Cirebon serta dana partisipasi lainnya.

Pada masa lalu tata kelola pendidikan belum sepenuhnya bebasis data atau sistem informasi yang akurat, tepat dan akuntabel. Namun sekarang sistem tersebut telah dibangun diantaranya DAPODIK dan lain-lain meskipun sampai saat ini masih terus menerus diadakan penyempurnaan dan perbaikan guna terpenuhinya satu-satunya data

pendidikan yang dapat digunakan oleh stakehorders yang membutuhkan.

Tabel 23. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

LEMBAR 1

N0.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN											
		TARGET 2014		TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017 (Th. N-2)		TARGET 2018 (Th. n-1)		TARGET 2019 (Th. n)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	
1	Meningkatnya Kesempatan												
	dan pemerataan pendidikan.												
	- RLS (Th)	Th	7.00	Th	7.20	Th	7.50	Th	6.50	Th	6.75	Th	7.00
	- AMH	%	94.76	%	94.96	%	94.63	%	94.83	%	95.03	%	95.23
	MELEK HURUF AL-QUR'AN												
	SD (%)	%	-	%	38	%	46	%	54	%	62	%	70
	SMP (%)	%	-	%	47	%	54	%	61	%	68	%	75
	SMA (%)	%	-	%	52	%	59	%	66				
	SMK (%)	2	-	%	52	%	59	%	66				
	- APK PAUD	%	17.67	%	18.02	%	36.7	%	37.82	%	38.91	%	40.00
	- APM PAUD	%		%		%		%	37.80	%	38.90	%	40.00
	- APK SD/MI	%	**104.76**	%	**106.59**	%	**109.00**	%	**109.29**	%	**109**	%	**109**
	- APM SD/MI	%	**100**	%	**100.29**	%	**99.93**	%	**99.94**	%	**99.95**	%	**99.96**
	- APK SMP/MTs	%	**103.30**	%	**110.38**	%	**110.00**	%	**110**	%	**110**	%	**110.11**
	- APM SMP/MTs	%	**100**	%	**89.60**	%	**89.90**	%	**90.10**	%	**90.30**	%	**90.50**
	- APK SM / K	%	**102.45**	%	**79.54**	%	**80.02**	%	**80.50**				
	- APM SM / K	%	**100**	%	**60.84**	%	**61.32**	%	**61.80**				
2	Meningkatnya Mutu dan rele-												
	vansi pendidikan.												
	- Angka Lulusan SD sederajat	%	**100**	%	100.00	%	**100.00**	%	**99.95**	%	99.96	%	99.97
	- Angka Lulusan SMP sederajat	%	**99.98**	%	99.00	%	**100.00**	%	**99.94**	%	**99.95**	%	**99.96**
	- Angka Lulusan SMA sederajat	%	**99.86**	%	99.00	%	**100.00**	%	**99.93**				
	- Angka Lulusan SMK sederajat	%	**99.97**	%	99.00	%	**99.71**	%	**99.77**				
	- Angka Melanjutkan SD ke SMP	%		%		%		%	**90.01**	%	**90.03**	%	**90.05**

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	
	- Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	**0.10**	%	**0.08**	%	**2.27**	%	**2.26**	%	**2.25**	%	**2.24**
	- Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	%	**0.50**	%	**0.45**	%	**0.21**	%	**0.2**	%	**0.19**	%	**0.18**
	- Angka Putus Sekolah SMA Sederajat	%	**0.21**	%	**0.35**	%	**0.62**	%	**0.6**				
	- Angka Putus Sekolah SMK Sederajat	%	**0.10**	%	**0.43**	%	**0.15**	%	**0.14**				
	- Rata-rata Nilai UN/US SD								77.55		78.00		78.33
	- Rata-rata Nilai UN/US SMP								28.00		28.50		29.00
3	Meningkatnya mutu tenaga pendidik												
	- Angka Guru Layak Mengajar :												
	PAUD					%		%	**61.80**	%	**62.30**	%	62.80
	SD	%	**78.42**	%	**78.87**	%	**82.00**	%	**82.50**	%	**83.00**	%	**83.50**
	SMP	%	**94.87**	%	**191.33**	%	**96.00**	%	**96.50**	%	**97.00**	%	**97.50**
	SMA	%	**96.25**	%	**96.70**	%	**96.75**	%	**97.00**				
	SMK	%	**97.75**	%	**98.20**	%	**95.26**	%	**95.51**				
4	Meningkatnya mutu dan jumlah sarana												
	dan prasarana pendidikan :												
	Terakreditasi												
	PAUD							%	-	%	-	%	-
	SD							%	99.95	%	99.96	%	99.97
	SMP							%	98.00	%	98.50	%	99.00
	Rasio Guru /Siswa :												
	SD							%	22.00	%	21.00	%	20.00
	SMP							%	16.00	%	18.00	%	20.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rasio Siswa Per Kelas												
	SD	**28.67**	Siswa	29.33	Siswa	30.00	Siswa	30.66	Siswa	31.33	Siswa	32.00	Siswa
	SMP	**25.17**	Siswa	27.33	Siswa	29.50	Siswa	31.66	Siswa	33.83	Siswa	36.00	Siswa
	SMA	**35.17**	Siswa	35.33	Siswa	35.50	Siswa	35.66	Siswa				
	SMK	**36.82**	Siswa	36.67	Siswa	36.50	Siswa	36.33	Siswa				
	Rasio Kelas Per Ruang Kelas												
	SD	%	**1.28**	%	**1.29**	%	**1.30**	%	**1.25**	%	1.24	%	1.24
	SMP	%	**1.80**	%	**1.81**	%	**1.82**	%	**1.37**	%	1.35	%	1.35
	SMA	%	**0.90**	%	**0.91**	%	**0.92**	%	**0.93**				
	SMK	%	**1.16**	%	**1.15**	%	**1.14**	%	**1.09**				
	Rasio Siswa Per Sekolah :												
	SD	230	Siswa	223	Siswa	215	Siswa	236	Siswa	238	Siswa	238	Siswa
	SMP	528	Siswa	617	Siswa	705	Siswa	524	Siswa	532	Siswa	532	Siswa
	SMA	527	Siswa	616	Siswa	705	Siswa	506	Siswa				
	SMK	628	Siswa	710	Siswa	783	Siswa	515	Siswa				
	Ruang Kelas keadaan Baik :												
	PAUD					%		%	**66.70**	%	**67.20**	%	**68.20**
	SD	%	**73.22**	%	**74.72**	%	**72.00**	%	**73.00**	%	**74.00**	%	**75.00**
	SMP	%	**90.26**	%	**91.76**	%	**78.90**	%	**79.30**	%	**79.64**	%	**80.00**
	SMA	%	**92.54**	%	**94.04**	%	**80.38**	%	**81.92**				
	SMK	%	**94.69**	%	**96.19**	%	**89.20**	%	**89.47**				
5	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi												
	manajeman pendidikan .												
	Manajemen Berbasis Sekolah :												
	SD	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**	%	100.00	%	100.00
	SMP	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**	%	100.00	%	100.00
	SMA	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**				
	SMK	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Meningkatnya peran serta masyarkat terhadap dunia pendidikan dengan peran aktif komite sekolah												
	SD	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**	%	100.00	%	100.00
	SMP	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**	%	100.00	%	100.00
	SMA	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**				
	SMK	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**				

LEMBAR 2

N0.	**INDIKATOR KINERJA**	**REALISASI CAPAIAN**											
		REALISASI 2014		**REALISASI 2015**		**REALISASI 2016**		**REALISASI 2017 (Th. n-2)**		**REALISASI 2018 (Th. n-1)**		**REALISASI 2014**	
(1)	(2)	(5)		(6)		(5)		(6)		(7)		(8)	
1	Meningkatnya Kesempatan												
	dan pemerataan pendidikan.												
	- RLS (Th)	Th	7.00	Th	7.20	Th	7.40	Th	6.41	Th	6.61	Th	7.00
	- AMH	%	94.76	%	94.96	%	95.16	%	94.77	%	95.53	%	94.76
	MELEK HURUF AL-QUR'AN												
	SD (%)	%	-	%	41.80	%	46.67	%	43.70	%	75.20	%	-
	SMP (%)	%	-	%	51.70	%	54.78	%	85.97	%	55.71	%	-
	SMA (%)	%	-	%	58.27	%	59.86	%	94.31			%	-
	SMK (%)	%	-	%	47.00	%	59.86	%	86.60			%	-
	- APK PAUD	%	17.67	%	18.02	%	50.09	%	49.39	%	66.40	%	17.67
	- APM PAUD	%		%		%		%		%		%	
	- APK SD/MI	%	**110.26**	%	**105.34**	%	**120.79**	%	**120.90**	%	**117.05**	%	**110.26**
	- APM SD/MI	%	**98.09**	%	**99.997**	%	**106.50**	%	**106.52**	%	**107.33**	%	**98.09**
	- APK SMP/MTs	%	**110.79**	%	**111.15**	%	**115.97**	%	**114.41**	%	**115.08**	%	**110.79**
	- APM SMP/MTs	%	**69.6**	%	**101.76**	%	**94.85**	%	**95.54**	%	**97.46**	%	**69.6**
	- APK SM / K	%	**74.60**	%	**113.98**	%	**96.64**	%	**100.65**			%	**74.60**
	- APM SM / K	%	**57.85**	%	**84.58**	%	**85.40**	%	**75.92**			%	**57.85**

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	
2	Meningkatnya Mutu dan rele-												
	vansi pendidikan.												
	- Angka Lulusan SD sederajat	%	99.50	%	98.99	%	96.50	%	95.80	%	100	%	99.50
	- Angka Lulusan SMP sederajat	%	**100**	%	**100.00**	%	**83.23**	%	**82.06**	%	**80.81**	%	**100**
	- Angka Lulusan SMA sederajat	%	**100**	%	**100.00**	%	**83.61**	%	**74.42**			%	**100**
	- Angka Lulusan SMK sederajat	%	**83.46**	%	**100.00**	%	**66.46**	%	**77.38**			%	**83.46**
	- Angka Melanjutkan SD ke SMP	%		%		%	**110.41**	%	**108.82**	%	**108.97**	%	
	- Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	**0.10**	%	**0.14**	%	**0.10**	%	**0.01**	%	**0.01**	%	**0.10**
	- Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	%	**0.45**	%	**0.68**	%	**0.35**	%	**0.29**	%	**0.24**	%	**0.45**
	- Angka Putus Sekolah SMA Sederajat	%	**0.37**	%	**0.72**	%	**0.29**	%	**0.56**			%	**0.37**
	- Angka Putus Sekolah SMK Sederajat	%	**0.45**	%	**0.64**	%	**0.06**	%	**0.02**			%	**0.45**
	- Rata-rata Nilai UN/US SD								74.1		76.63		
	- Rata-rata Nilai UN/US SMP								52.8		58.94		
3	Meningkatnya mutu tenaga pendidik												
	- Angka Guru Layak Mengajar :												
	PAUD					%		%		%	71.63		
	SD	%	**77.97**	%	**84.92**	%	**89.66**	%	**94.05**	%	**95.42**	%	**77.97**
	SMP	%	**94.42**	%	**99.29**	%	**95.05**	%	**96.46**	%	**97.27**	%	**94.42**
	SMA	%	**95.8**	%	**95.42**	%	**99.07**	%	**98.78**			%	**95.8**
	SMK	%	**94.51**	%	**96.30**	%	**96.57**	%	**97.00**			%	**94.51**
4	Meningkatnya mutu dan jumlah sarana												
	dan prasarana pendidikan :												
	Jml. Sekolah Terakreditasi												
	PAUD							%	-	%	-		
	SD							%	99.95	%	97.70		
	SMP							%	98.00	%	85.00		

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	
	Rasio Guru /Siswa :												
	SD							%	20.00	%	21.00		
	SMP							%	16.00	%	15.00		
	Rasio Siswa Per Kelas												
	SD	**28.00**	Siswa	30	Siswa	30.00	Siswa	27.00	Siswa	22.00	Siswa	**28.00**	Siswa
	SMP	**34.00**	Siswa	36	Siswa	31.00	Siswa	29.00	Siswa	32.00	Siswa	**34.00**	Siswa
	SMA	**35.00**	Siswa	35	Siswa	35.00	Siswa	37.00	Siswa			**35.00**	Siswa
	SMK	**37.00**	Siswa	36	Siswa	34.00	Siswa	33.00	Siswa			**37.00**	Siswa
	Rasio Kelas Per Ruang Kelas												
	SD	%	**1.29**	%	1.18	%	1.12	%	1.24	%	1.50	%	**1.29**
	SMP	%	**1.13**	%	1.02	%	1.12	%	1.17	%	1.02	%	**1.13**
	SMA	%	**0.89**	%	0.97	%	0.97	%	1.22			%	**0.89**
	SMK	%	**1.17**	%	1.21	%	1.14	%	1.14			%	**1.17**
	Rasio Siswa Per Sekolah :												
	SD	238	Siswa	227	Siswa	219	Siswa	219	Siswa	219	Siswa	238	Siswa
	SMP	472	Siswa	487	Siswa	426	Siswa	425	Siswa	421	Siswa	472	Siswa
	SMA	438	Siswa	466	Siswa	500	Siswa	498	Siswa			438	Siswa
	SMK	455	Siswa	480	Siswa	473	Siswa	482	Siswa			455	Siswa
	Ruang Kelas keadaan Baik :												
	PAUD					%		%		%	86.00		
	SD	%	**69.00**	%	**67.51**	%	**23.02**	%	**66.39**	%	**65.82**	%	**69.00**
	SMP	%	**77.85**	%	**80.15**	%	**79.69**	%	**81.35**	%	**79.38**	%	**77.85**
	SMA	%	**75.77**	%	**80.29**	%	**74.31**	%	**79.24**			%	**75.77**
	SMK	%	**88.40**	%	**90.39**	%	**92.67**	%	**92.15**			%	**88.40**

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	
5	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi												
	manajeman pendidikan .												
	Manajemen Berbasis Sekolah :												
	SD	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00
	SMP	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00
	SMA	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00			%	100.00
	SMK	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00			%	100.00
6	Meningkatnya peran serta masyarkat terhadap dunia pendidikan dengan peran aktif komite sekolah												
	SD	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00
	SMP	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00
	SMA	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00			%	100.00
	SMK	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00			%	100.00

TABEL T-C. 24 REALISASI ANGGARAN 3 TAHUN TERAKHIR 2017 s.d. 2018 (terlampir)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Pembangunan pendidikan harus dilakukan secara lintas sektoral dan terpadu antar instansi pemerintah serta antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Untuk itu perlu dikembangkan iklim pembangunan pendidikan yang memungkinkan bagi setiap komponen pemerintahan maupun masyarakat untuk bisa secara bersama-sama membahas pendidikan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya masing-masing.

Masalah-masalah teknis non-kependidikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan antara lain komunikasi, transportasi, sosial budaya, dan sosial ekonomi. Penanganannya perlu dilakukan secara lintas sektoral, agar pemerataan pendidikan dan pemberian pelayanan pendidikan minimal bagi masyarakat bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu komponen IPM adalah indek pendidikan, sedangkan RLS dan AMH merupakan indikator dalam pencapaian indek pendidikan. Untuk meningkatkan RLS merupakan kewenangan lintas sektoral sedangka AMH merupakan kewenangan penuh Dinas Pendidikan. Dengan demikian perlu adanya data yang lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan tentang jumlah penduduk usia sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana, karena semua itu saling terkait dalam meningkatkan RLS dan AMH sehingga pada gilirannya dapat mendongkrak IPM sesuai target yang ditetapkan.

2.4.1 Jumlah Penduduk usia sekolah

Penduduk Kabupaten Cirebon berjumlah 2.124.070 orang, laki-laki 1.076.338 Orang dan perempuan 1.047.732 orang (*data Disdukcapil Januari 2018*) tersebar di 40 Kecamatan / 424 desa dan kelurahan dengan kondisi ekonomi keluarga 29.01% pra KS, 28.58% KS I, 28.30% KS dan 14,11% KSIII dan selebihnya merupakan keluarga KS III+. Dari jumlah tersebut penduduk usia sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SM sumber data Suvey IPM tahun 2015 sebanyak 656.668 orang terdiri dari laki-laki 349.119 orang dan perempuan 307.469 orang. *(sumber data : Survei IPM Kecamatan Tahun 2015)*

PENDUDUK UMUR 7 - 12 TH MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN CIREBON (HASIL SURVEI IPM TAHUN 2015)

Laki-laki+Perempuan

No	Kecamatan	Partisipasi Sekolah			Jumlah
		Tidak / Belum Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
1	010 WALED	87	6,717	-	6,804
2	011 PASALEMAN	-	3,186	-	3,186
3	020 CILEDUG	-	5,203	140	5,343
4	021 PABUARAN	-	4,218	-	4,218
5	030 LOSARI	-	7,594	-	7,594
6	031 PABEDILAN	-	6,584	135	6,719
7	040 BABAKAN	-	8,640	152	8,792
8	041 GEBANG	-	7,724	-	7,724
9	050 KARANGSEMBUNG	-	4,329	139	4,468
10	051 KARANGWARENG	-	3,108	113	3,221
11	060 LEMAHABANG	-	7,416	-	7,416
12	061 SUSUKAN LEBAK	-	4,883	160	5,043
13	070 SEDONG	-	5,053	-	5,053
14	080 ASTANAJAPURA	-	10,852	316	11,168
15	081 PANGENAN	-	6,696	133	6,829
16	090 MUNDU	242	10,752	-	10,994
17	100 BEBER	-	5,133	152	5,285
18	101 GREGED	-	8,099	-	8,099
19	111 TALUN	-	9,927	151	10,078
20	120 SUMBER	383	11,184	-	11,567
21	121 DUKUPUNTANG	-	8,609	124	8,733
22	130 PALIMANAN	-	7,592	261	7,853
23	140 PLUMBON	109	9,505	-	9,614
24	141 DEPOK	-	7,278	-	7,278
25	150 WERU	-	7,873	352	8,225
26	151 PLERED	-	6,546	671	7,217
27	161 TENGAH TANI	92	5,505	233	5,830
28	162 KEDAWUNG	-	7,685	-	7,685
29	171 GUNUNGJATI	254	11,013	-	11,267
30	180 KAPETAKAN	191	7,736	121	8,048
31	181 SURANENGGALA	-	5,517	-	5,517
32	190 KLANGENAN	-	6,399	160	6,559
33	191 JAMBLANG	97	4,435	-	4,532
34	200 ARJAWINANGUN	232	8,110	266	8,608
35	201 PANGURAGAN	-	5,836	-	5,836
36	210 CIWARINGIN	-	5,235	-	5,235
37	211 GEMPOL	-	5,975	339	6,314
38	220 SUSUKAN	-	8,102	132	8,234
39	230 GEGESIK	-	9,091	143	9,234
40	231 KALIWEDI	-	4,641	131	4,772
	Jumlah	1,687	279,981	4,524	286,192

Sumber Data Survei IPM 2015, Kabupaten Cirebon

PENDUDUK KELOMPOK UMUR 13 S.D. 15 TAHUN MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN CIREBON (HASIL SURVEI IPM TAHUN 2015)

Laki-laki+Perempuan

No	Kecamatan	Partisipasi Sekolah			Jumlah
		Tidak / Belum Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
1	010 WALED	-	2,551	823	3,374
2	011 PASALEMAN	-	835	722	1,557
3	020 CILEDUG	-	2,058	559	2,617
4	021 PABUARAN	-	1,767	292	2,059
5	030 LOSARI	-	3,915	-	3,915
6	031 PABEDILAN	-	2,191	1,247	3,438
7	040 BABAKAN	-	3,605	592	4,197
8	041 GEBANG	-	3,201	649	3,850
9	050 KARANGSEMBUNG	-	1,937	274	2,211
10	051 KARANGWARENG	-	1,513	113	1,626
11	060 LEMAHABANG	-	3,137	160	3,297
12	061 SUSUKAN LEBAK	-	2,197	171	2,368
13	070 SEDONG	-	2,454	-	2,454
14	080 ASTANAJAPURA	-	5,534	472	6,006
15	081 PANGENAN	-	2,930	266	3,196
16	090 MUNDU	-	4,391	1,085	5,476
17	100 BEBER	-	1,905	641	2,546
18	101 GREGED	-	2,350	1,442	3,792
19	111 TALUN	-	4,145	303	4,448
20	120 SUMBER	-	4,233	1,369	5,602
21	121 DUKUPUNTANG	-	3,289	867	4,156
22	130 PALIMANAN	-	3,413	391	3,804
23	140 PLUMBON	-	4,047	570	4,617
24	141 DEPOK	-	3,502	166	3,668
25	150 WERU	-	3,357	869	4,226
26	151 PLERED	-	2,954	405	3,359
27	161 TENGAH TANI	-	1,874	859	2,733
28	162 KEDAWUNG	-	3,942	-	3,942
29	171 GUNUNGJATI	-	5,080	157	5,237
30	180 KAPETAKAN	191	3,549	467	4,207
31	181 SURANENGGALA	132	2,856	-	2,988
32	190 KLANGENAN	-	2,865	624	3,489
33	191 JAMBLANG	-	2,181	130	2,311
34	200 ARJAWINANGUN	-	4,306	259	4,565
35	201 PANGURAGAN	-	2,351	531	2,882
36	210 CIWARINGIN	223	2,741	253	3,217
37	211 GEMPOL	-	2,542	895	3,437
38	220 SUSUKAN	-	3,816	544	4,360
39	230 GEGESIK	-	3,619	856	4,475
40	231 KALIWEDI	-	2,301	131	2,432
	Jumlah	546	121,434	20,154	142,134

Sumber Data Survei IPM 2015, Kabupaten Cirebon

PENDUDUK UMUR 16 S.D. 18 TH MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN CIREBON (HASIL SURVEI IPM TAHUN 2015)

Laki-laki+Perempuan

No	Kecamatan	Partisipasi Sekolah			Jumlah
		Tidak / Belum Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
1	010 WALED	-	1,168	2,001	3,169
2	011 PASALEMAN	-	1,002	423	1,425
3	020 CILEDUG	-	1,598	704	2,302
4	021 PABUARAN	-	539	1,426	1,965
5	030 LOSARI	-	2,346	1,352	3,698
6	031 PABEDILAN	-	1,272	1,819	3,091
7	040 BABAKAN	-	2,665	1,148	3,813
8	041 GEBANG	-	1,373	2,031	3,404
9	050 KARANGSEMBUNG	-	884	1,234	2,118
10	051 KARANGWARENG	-	500	1,021	1,521
11	060 LEMAHABANG	140	1,730	1,173	3,043
12	061 SUSUKAN LEBAK	-	1,707	438	2,145
13	070 SEDONG	-	703	1,546	2,249
14	080 ASTANAJAPURA	-	3,738	2,370	6,108
15	081 PANGENAN	-	874	2,174	3,048
16	090 MUNDU	99	1,263	3,729	5,091
17	100 BEBER	-	607	1,540	2,147
18	101 GREGED	-	1,054	2,462	3,516
19	111 TALUN	-	2,418	1,660	4,078
20	120 SUMBER	-	3,624	1,740	5,364
21	121 DUKUPUNTANG	-	2,633	1,238	3,871
22	130 PALIMANAN	-	1,703	1,953	3,656
23	140 PLUMBON	260	2,957	1,280	4,497
24	141 DEPOK	-	1,981	1,543	3,524
25	150 WERU	-	1,279	3,131	4,410
26	151 PLERED	-	888	2,316	3,204
27	161 TENGAH TANI	-	1,486	1,136	2,622
28	162 KEDAWUNG	-	3,211	893	4,104
29	171 GUNUNGJATI	254	3,665	1,113	5,032
30	180 KAPETAKAN	-	1,308	2,324	3,632
31	181 SURANENGGALA	132	1,729	1,070	2,931
32	190 KLANGENAN	138	1,633	1,766	3,537
33	191 JAMBLANG	-	1,039	1,232	2,271
34	200 ARJAWINANGUN	-	3,013	1,316	4,329
35	201 PANGURAGAN	-	1,104	1,660	2,764
36	210 CIWARINGIN	-	1,687	1,733	3,420
37	211 GEMPOL	-	2,453	882	3,335
38	220 SUSUKAN	-	1,281	2,704	3,985
39	230 GEGESIK	-	1,837	2,284	4,121
40	231 KALIWEDI	-	724	1,510	2,234
	Jumlah	1,023	68,676	65,075	134,774

Sumber Data Survei IPM 2015, Kabupaten Cirebon

A. Jumlah peserta didik

Banyak sedikitnya jumlah peserta didik berpengaruh langsung pada tingkat capaian RLS sekaligus tingkat capaian APK, APM pada semua jenjang pendidikan. Dengan demikian perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk terus meningkatkan jumlah peserta didik pada semua jenjang.

JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

No.	Kecamatan	Siswa menurut Status Sekolah						
		Negeri			Swasta			Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
01	Waled	2,617	2,485	5,102	0	0	0	5,102
02	Ciledug	2,329	2,254	4,583	75	67	142	4,725
03	Losari	2,146	1,983	4,129	0	0	0	4,129
04	Babakan	3,498	3,258	6,756	0	0	0	6,756
05	Karangsembung	1,898	1,801	3,699	0	0	0	3,699
06	Lemahabang	2,857	2,711	5,568	232	209	441	6,009
07	Sedong	2,157	1,928	4,085	0	0	0	4,085
08	Astana Japura	2,582	2,351	4,933	256	244	500	5,433
09	Mundu	3,056	2,940	5,996	57	31	88	6,084
10	Beber	2,403	2,191	4,594	0	0	0	4,594
11	Sumber	4,316	4,090	8,406	1,092	955	2,047	10,453
12	Palimanan	3,288	3,128	6,416	0	0	0	6,416
13	Plumbon	3,634	3,277	6,911	0	0	0	6,911
14	Weru	3,178	3,008	6,186	0	0	0	6,186
15	Kapetakan	2,577	2,382	4,959	0	0	0	4,959
16	Klangenan	2,681	2,472	5,153	73	53	126	5,279
17	Arjawinangun	3,465	3,155	6,620	42	38	80	6,700
18	Ciwaringin	1,810	1,671	3,481	0	0	0	3,481
19	Susukan	3,017	2,935	5,952	209	182	391	6,343
20	Gegesik	3,017	2,702	5,719	0	0	0	5,719
21	Susukanlebak	1,754	1,680	3,434	0	0	0	3,434
22	Pabedilan	2,396	2,096	4,492	36	34	70	4,562
23	Dukupuntang	2,540	2,362	4,902	0	0	0	4,902
24	Panguragan	2,019	1,931	3,950	43	24	67	4,017
25	Kaliwedi	1,703	1,622	3,325	0	0	0	3,325
26	Pangenan	1,808	1,608	3,416	0	0	0	3,416
27	Gebang	2,845	2,662	5,507	259	235	494	6,001
28	Depok	2,945	2,842	5,787	40	25	65	5,852
29	Kedawung	2,033	1,846	3,879	428	316	744	4,623
30	Karangwareng	1,319	1,270	2,589	0	0	0	2,589
31	Talun	2,709	2,593	5,302	324	318	642	5,944
32	Gunung Jati	2,758	2,725	5,483	315	277	592	6,075
33	Pasaleman	1,258	1,138	2,396	0	0	0	2,396
34	Pabuaran	1,709	1,608	3,317	0	0	0	3,317
35	Tengahtani	2,200	2,090	4,290	0	0	0	4,290
36	Plered	3,099	2,740	5,839	0	0	0	5,839
37	Gempol	2,098	1,759	3,857	81	65	146	4,003
38	Greged	3,145	2,877	6,022	0	0	0	6,022
39	Suranenggala	2,118	2,045	4,163	0	0	0	4,163
40	Jamblang	1,842	1,640	3,482	55	59	114	3,596
Jumlah		**100,824**	**93,856**	**194,680**	**3,617**	**3,132**	**6,749**	**201,429**

Sumber data : Profil Pendidikan 2018/2019

JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	KECAMATAN	Negeri			Swasta			Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
1	Waled	487	635	1,122	404	364	768	1,890
2	Ciledug	793	848	1,641	430	328	758	2,399
3	Losari	701	865	1,566	253	180	433	1,999
4	Babakan	579	717	1,296	506	336	842	2,138
5	Karang Sembung	776	825	1,601	173	71	244	1,845
6	Lemahabang	829	907	1,736	531	442	973	2,709
7	Sedong	378	402	780	0	0	0	780
8	Astana Japura	425	506	931	524	427	951	1,882
9	Mundu	597	710	1,307	134	90	224	1,531
10	Beber	464	530	994	365	214	579	1,573
11	Sumber	1354	1411	2,765	836	666	1,502	4,267
12	Palimanan	1679	1855	3,534	820	542	1,362	4,896
13	Plumbon	1025	1077	2,102	94	95	189	2,291
14	Weru	852	911	1,763	1185	756	1,941	3,704
15	Kapetakan	851	837	1,688	0	0	0	1,688
16	Klangenan	743	692	1,435	78	79	157	1,592
17	Arjawinangun	734	797	1,531	459	325	784	2,315
18	Ciwaringin	873	1068	1,941	865	559	1,424	3,365
19	Susukan	579	693	1,272	233	199	432	1,704
20	Gegesik	1145	1291	2,436	378	341	719	3,155
21	Susukan Lebak	743	773	1,516	0	0	0	1,516
22	Pabedilan	721	747	1,468	112	114	226	1,694
23	Dukupuntang	415	496	911	1191	844	2,035	2,946
24	Panguragan	449	506	955	221	182	403	1,358
25	Kaliwedi	527	528	1,055	132	128	260	1,315
26	Pangenan	415	396	811	373	305	678	1,489
27	Gebang	737	674	1,411	199	156	355	1,766
28	Depok	786	868	1,654	335	259	594	2,248
29	Kedawung	499	541	1,040	145	96	241	1,281
30	Karangwareng	401	362	763	51	15	66	829
31	Talun	490	522	1,012	10	4	14	1,026
32	Gunung Jati	1241	1376	2,617	277	225	502	3,119
33	Pasaleman	314	320	634	176	156	332	966
34	Pabuaran	459	359	818	200	100	300	1,118
35	Tengah Tani	525	491	1,016	46	22	68	1,084
36	Plered	1094	1019	2,113	0	0	0	2,113
37	Gempol	517	520	1,037	0	0	0	1,037
38	Greged	319	417	736	42	38	80	816
39	Suranenggala	802	878	1,680	0	0	0	1,680
40	Jamblang	724	790	1,514	0	0	0	1,514
JML		**28,042**	**30,160**	**58,202**	**11,778**	**8,658**	**20,436**	**78,638**

Profil Pendidikan 2018/2019

B. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan

Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yakni " Masyarakat Kabupaten Cirebon Cerdas dan Kompetitif " diperlukan tenaga pendidik dan kependidikan dengan jumlah yang memadai. Saat ini jumlahnya masih sangat kurang atau belum sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan sehingga mayoritas

sekolah mengangkat tenaga honorer untuk menutup kebutuhan tersebut. Selain itu masih terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru, antara lain ; (1) adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, (2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan (4) kesejahteraan guru yang belum memadai. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut dibawah ini dapat dilihat jumlah tenaga penndidik dan kependidikan di Kabupaten Cirebon.

Jumlah Tenaga Pendidik

JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
1	Waled	0	36	92	128	102	230
2	Ciledug	3	40	96	139	98	237
3	Losari	3	24	80	107	95	202
4	Babakan	3	54	131	188	129	317
5	Karang Sembung	1	40	79	120	80	200
6	Lemahabang	1	49	106	156	122	278
7	Sedong	1	24	85	110	71	181
8	Astana Japura	0	28	91	119	116	235
9	Mundu	0	39	79	118	124	242
10	Beber	0	22	70	92	88	180
11	Sumber	1	72	202	275	290	565
12	Palimanan	3	69	133	205	124	329
13	Plumbon	1	88	154	243	92	335
14	Weru	4	54	124	182	100	282
15	Kapetakan	3	30	92	125	115	240
16	Klangenan	7	54	131	192	101	293
17	Arjawinangun	4	73	121	198	105	303
18	Ciwaringin	1	34	85	120	54	174
19	Susukan	2	42	106	150	144	294
20	Gegesik	5	84	146	235	74	309
21	Susukan Lebak	1	35	62	98	72	170
22	Pabedilan	1	47	92	140	85	225
23	Dukupuntang	2	67	116	185	105	290
24	Panguragan	2	37	78	117	91	208
25	Kaliwedi	3	45	65	113	50	163
26	Pangenan	1	18	43	62	72	134
27	Gebang	1	45	93	139	138	277
28	Depok	1	58	148	207	90	297
29	Kedawung	6	23	90	119	126	245
30	Karangwareng	1	23	50	74	51	125
31	Talun	0	34	104	138	136	274
32	Gunung Jati	2	46	154	202	126	328
33	Pasaleman	1	24	54	79	44	123
34	Pabuaran	0	30	67	97	69	166
35	Tengah Tani	1	16	82	99	98	197
36	Plered	4	69	101	174	88	262
37	Gempol	0	48	81	129	85	214

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
38	Greged	4	26	61	91	109	200
39	Suranenggala	2	32	88	122	86	208
40	Jamblang	3	50	93	146	73	219
JML		**79**	**1,729**	**3,925**	**5,733**	**4,018**	**9,751**

Profil Pendidikan 2018/2019

JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
1	Waled	0	13	14	27	104	131
2	Ciledug	0	11	39	50	99	149
3	Losari	0	15	31	46	99	145
4	Babakan	0	19	21	40	115	155
5	Karang Sembung	1	12	33	46	62	108
6	Lemahabang	0	19	26	45	100	145
7	Sedong	1	10	8	19	32	51
8	Astana Japura	0	7	18	25	114	139
9	Mundu	0	12	21	33	59	92
10	Beber	0	7	24	31	59	90
11	Sumber	0	26	67	93	225	318
12	Palimanan	0	27	80	107	168	275
13	Plumbon	1	25	37	63	52	115
14	Weru	1	24	38	63	141	204
15	Kapetakan	0	18	16	34	64	98
16	Klangenan	0	17	17	34	95	129
17	Arjawinangun	0	22	27	49	165	214
18	Ciwaringin	0	21	18	39	177	216
19	Susukan	0	10	18	28	56	84
20	Gegesik	0	23	39	62	123	185
21	Susukan Lebak	0	12	27	39	35	74
22	Pabedilan	0	16	27	43	68	111
23	Dukupuntang	0	8	20	28	181	209
24	Panguragan	0	7	21	28	78	106
25	Kaliwedi	0	12	20	32	69	101
26	Pangenan	0	13	11	24	118	142
27	Gebang	0	23	19	42	102	144
28	Depok	0	18	27	45	113	158
29	Kedawung	0	7	30	37	38	75
30	Karangwareng	0	9	8	17	51	68
31	Talun	0	10	28	38	37	75
32	Gunung Jati	1	22	51	74	124	198
33	Pasaleman	0	9	10	19	41	60
34	Pabuaran	0	10	14	24	60	84
35	Tengah Tani	0	12	16	28	29	57
36	Plered	0	25	43	68	64	132
37	Gempol	0	10	19	29	56	85
38	Greged	0	9	10	19	45	64
39	Suranenggala	0	16	25	41	59	100
40	Jamblang	0	22	30	52	34	86
JML		**5**	**608**	**1,048**	**1,661**	**3,511**	**5,172**

Profil Pendidikan 2018/2019

D. Jumlah sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mutlak diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik jumlah maupun kwalitasnya. Saat ini yang terlihat jelas adalah masih kurangnya daya tampung apabila dibandingkan antara rasio jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah ruang kelas yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak pada rendahnya APK, APM di Kabupaten Cirebon.

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN DAN RUANG KELAS

JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

NO	KECAMATAN	Sek. N	Sek. S	JML. N/S	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				Ruang Kelas	Ruang Kelas
					Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Bkn Milik	Seluruh
1	Waled	23	0	23	95	44	11	150	0	150
2	Ciledug	22	1	23	85	32	22	139	0	139
3	Losari	20	0	20	77	31	18	126	0	126
4	Babakan	30	0	30	148	54	9	211	0	211
5	KR Sembung	22	1	23	92	29	1	122	4	126
6	Lemahabang	26	1	27	98	76	9	183	0	183
7	Sedong	22	0	22	75	25	6	106	0	106
8	Astana Japura	22	2	24	100	25	24	149	0	149
9	Mundu	23	1	24	83	34	25	142	0	142
10	Beber	19	0	19	86	28	8	122	0	122
11	Sumber	32	6	38	249	58	19	326	2	328
12	Palimanan	28	0	28	119	58	14	191	0	191
13	Plumbon	31	0	31	153	47	17	217	0	217
14	Weru	24	0	24	119	20	12	151	0	151
15	Kapetakan	20	0	20	111	22	9	142	0	142
16	Klangenan	24	1	25	117	37	5	159	0	159
17	Arjawinangun	26	1	27	126	51	28	205	0	205
18	Ciwaringin	16	0	16	76	26	16	118	0	118
19	Susukan	28	2	30	125	70	4	199	0	199
20	Gegesik	31	0	31	131	58	16	205	0	205
21	Susukan Lebak	20	0	20	55	50	24	129	0	129
22	Pabedilan	23	1	24	65	60	16	141	0	141
23	Dukupuntang	28	0	28	101	33	22	156	18	174
24	Panguragan	19	1	20	69	44	10	123	0	123
25	Kaliwedi	16	0	16	83	18	6	107	7	114
26	Pangenan	15	0	15	56	20	12	88	0	88
27	Gebang	24	3	27	128	40	10	178	0	178
28	Depok	26	1	27	121	54	8	183	0	183
29	Kedawung	15	3	18	100	36	8	144	0	144
30	Karangwareng	15	0	15	50	31	13	94	6	100
31	Talun	23	3	26	116	57	11	184	0	184
32	Gunung Jati	30	2	32	133	60	26	219	17	236
33	Pasaleman	13	0	13	32	41	10	83	0	83
34	Pabuaran	15	0	15	83	13	7	103	0	103
35	Tengah Tani	18	0	18	70	39	7	116	0	116
36	Plered	22	0	22	106	33	10	149	0	149
37	Gempol	18	1	19	92	34	2	128	1	129
38	Greged	18	0	18	84	37	9	130	0	130
39	Suranenggala	20	0	20	103	27	0	130	0	130
40	Jamblang	20	1	21	83	21	18	122	6	128
JML		**887**	**32**	**919**	**3,995**	**1,573**	**502**	**6,070**	**61**	**6,131**

Profil Pendidikan 2018/2019

JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	KECAMATAN	Sek. N	Sek. S	JML Sek N/S	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				Ruang Kelas	Ruang Kelas
					Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Bkn Milik	Seluruh
1	Waled	2	3	5	48	6	3	57	0	57
2	Ciledug	2	3	5	58	3	6	67	0	67
3	Losari	3	3	6	55	12	3	70	0	70
4	Babakan	2	4	6	58	11	0	69	0	69
5	Karang Sembung	3	1	4	33	20	14	67	0	67
6	Lemahabang	2	4	6	57	16	0	73	1	74
7	Sedong	2	0	2	27	6	1	34	0	34
8	Astana Japura	1	5	6	53	4	6	63	11	74
9	Mundu	2	2	4	34	4	0	38	4	42
10	Beber	1	2	3	38	2	9	49	0	49
11	Sumber	3	11	14	87	21	1	109	3	112
12	Palimanan	4	4	8	121	16	7	144	0	144
13	Plumbon	2	1	3	48	13	4	65	0	65
14	Weru	2	4	6	92	10	7	109	0	109
15	Kapetakan	2	0	2	38	8	4	50	25	75
16	Klangenan	2	2	4	44	2	0	46	0	46
17	Arjawinangun	2	8	10	76	11	2	89	6	95
18	Ciwaringin	2	6	8	83	8	6	97	0	97
19	Susukan	2	1	3	42	7	7	56	0	56
20	Gegesik	3	3	6	77	11	8	96	2	98
21	Susukan Lebak	2	0	2	33	5	5	43	0	43
22	Pabedilan	2	1	3	47	14	5	66	0	66
23	Dukupuntang	1	10	11	69	1	3	73	12	85
24	Panguragan	1	3	4	31	10	0	41	0	41
25	Kaliwedi	2	3	5	43	3	1	47	0	47
26	Pangenan	2	4	6	32	1	2	35	4	39
27	Gebang	2	3	5	33	24	10	67	0	67
28	Depok	2	4	6	60	12	0	72	6	78
29	Kedawung	1	2	3	37	8	4	49	0	49
30	Karangwareng	2	1	3	25	0	0	25	0	25
31	Talun	2	1	3	25	8	0	33	0	33
32	Gunung Jati	3	3	6	84	8	7	99	0	99
33	Pasaleman	1	1	2	2	14	14	30	0	30
34	Pabuaran	1	2	3	34	1	7	42	0	42
35	Tengah Tani	1	1	2	22	3	3	28	0	28
36	Plered	3	0	3	39	8	6	53	7	60
37	Gempol	2	0	2	32	0	0	32	0	32
38	Greged	2	1	3	29	2	0	31	0	31
39	Suranenggala	2	0	2	43	6	0	49	0	49
40	Jamblang	2	0	2	24	14	9	47	0	47
JML		**80**	**107**	**187**	**1,913**	**333**	**164**	**2,410**	**81**	**2,491**

Profil Pendidikan 2018/2019

E. Manajemen pengelolaan pendidikan

Seiring bergulirnya era otonomi daerah dimana terdapat pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sehingga membawa nuansa baru dalam sistem pengelolaan pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Otonomi pendidikan memerlukan profesionalisme pengelolaan manajemen baik tingkat Kabupaten, kecamatan maupun tingkat sekolah. Sebagian besar pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen pendidikan di Kabupaten Cirebon sudah berjalan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti kinerja manajemen birokrasi pendidikan masih dirasa kurang sehingga tingkat efisien dan efektifitasnya masih rendah. Kurang tersedia data pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel, untuk itu perlu secepatnya dibangun sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara Dinas sampai ke sekolah-sekolah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang handal.

Otonomi Daerah juga berdampak pada pengelolaan manajemen ditingkat sekolah yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah atau school based management. Saat ini seluruh sekolah di Kabupaten Cirebon telah melakasanakan MBS ditandai dengan adanya beberapa prinsip umum yang patut menjadi pedoman dalam pelaksanaan MBS diantaranya : sekolah telah memiliki visi, misi dan strategi kearah pencapaian mutu pendidikan, melibatkan partisipasi masyarakat, terbentuknya Komite Sekolah serta adanya transparansi dan akuntabilitas dimana sekolah beserta Komite Sekolah merupakan institusi terdepan yang paling bertanggungjawab dalam pengeloaan sekolah.

APK/APM TK/PAUD

No	KECAMATAN	APK Tingkat PAUD			APK Tingkat TK		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Waled	35.13	31.29	33.27	24.01	25.89	24.89
02	Ciledug	47.52	52.28	49.79	52.29	59.71	55.75
03	Losari	23.83	29.78	26.64	25.46	31.67	28.49
04	Babakan	38.06	39.38	38.69	40.79	43.83	42.24
05	Karang Sembung	19.16	20.28	19.70	17.77	19.68	18.68
06	Lemahabang	63.73	62.35	63.08	81.47	77.03	79.29
07	Sedong	23.38	24.73	24.03	22.72	22.79	22.75
08	Astana Japura	69.67	81.70	75.45	55.18	65.81	60.25

No	KECAMATAN	APK Tingkat PAUD			APK Tingkat TK		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
09	Mundu	59.89	63.52	61.61	64.91	67.70	66.23
10	Beber	17.66	18.41	18.02	8.58	10.47	9.48
11	Sumber	72.06	75.73	73.83	77.80	77.01	77.42
12	Palimanan	23.75	25.18	24.44	23.24	24.18	23.69
13	Plumbon	61.54	61.43	61.48	57.01	59.50	58.19
14	Weru	32.09	29.77	30.97	38.42	34.97	36.75
15	Kapetakan	13.85	17.22	15.46	9.70	14.07	11.74
16	Klangenan	22.83	21.43	22.14	12.68	11.51	12.11
17	Arjawinangun	35.80	36.63	36.20	32.76	32.66	32.71
18	Ciwaringin	16.93	18.90	17.86	15.97	18.15	17.02
19	Susukan	19.00	20.24	19.59	13.45	16.80	15.04
20	Gegesik	39.99	42.63	41.26	38.81	36.90	37.88
21	Susukan Lebak	21.93	23.60	22.73	20.08	21.89	20.95
22	Pabedilan	28.08	30.76	29.38	31.30	33.68	32.44
23	Dukupuntang	48.92	51.05	49.94	43.49	46.95	45.11
24	Panguragan	21.03	25.51	23.18	21.11	25.47	23.19
25	Kaliwedi	39.34	35.55	37.48	41.28	39.84	40.58
26	Pangenan	36.51	42.20	39.29	29.69	32.79	31.21
27	Gebang	29.03	34.87	31.78	34.06	36.03	35.02
28	Depok	37.57	37.69	37.62	33.21	34.85	34.00
29	Kedawung	49.91	48.69	49.31	54.14	52.11	53.15
30	Karangwareng	9.20	9.29	9.24	8.48	8.13	8.31
31	Talun	37.95	39.20	38.55	36.42	36.23	36.32
32	Gunung Jati	114.85	120.50	117.54	116.30	109.58	112.96
33	Pasaleman	18.33	22.24	20.18	16.49	17.52	17.00
34	Pabuaran	34.44	35.92	35.15	20.93	26.46	23.52
35	Tengah Tani	21.04	25.20	23.03	14.26	13.51	13.89
36	Plered	38.12	35.79	37.02	52.75	49.11	51.02
37	Gempol	40.97	40.05	40.53	32.13	32.20	32.16
38	Greged	34.97	32.88	33.96	30.34	27.49	28.92
39	Suranenggala	29.91	28.40	29.17	35.09	35.35	35.22
40	Jamblang	30.55	31.87	31.18	40.81	40.46	40.65
	Rata-rata	32.90	34.45	33.64	32.15	33.42	32.76

Sumber Data: Profil Pendidikan 2018/2019

APK/APM SD

No	KECAMATAN	APK Tingkat SD Termasuk Paket A			APM Tingkat SD Termasuk Paket A		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Waled	120.62	117.73	119.22	108.06	104.92	106.54
02	Ciledug	121.60	118.79	120.21	112.66	110.24	111.46
03	Losari	127.12	123.80	125.48	117.91	112.91	115.44
04	Babakan	148.25	155.02	151.43	130.83	137.65	134.05
05	Karang Sembung	62.15	62.40	62.27	58.42	58.35	58.38
06	Lemahabang	193.97	201.31	197.51	176.59	185.25	180.77
07	Sedong	87.33	83.63	85.53	82.64	79.32	81.03
08	Astana Japura	236.04	225.07	230.63	222.79	212.11	217.53
09	Mundu	211.71	206.62	209.25	199.75	196.18	198.02
10	Beber	66.86	64.16	65.54	61.66	59.91	60.81
11	Sumber	266.07	273.27	269.48	239.26	246.10	242.50
12	Palimanan	92.19	95.81	93.92	82.30	86.75	84.43
13	Plumbon	194.98	199.08	196.91	177.00	181.37	179.05
14	Weru	107.19	111.61	109.30	99.42	104.54	101.86
15	Kapetakan	69.81	63.92	66.94	62.66	57.13	59.97

No	KECAMATAN	APK Tingkat PAUD			APK Tingkat TK		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
16	Klangenan	90.44	87.66	89.09	82.96	80.18	81.61
17	Arjawinangun	140.98	140.81	140.90	125.90	125.85	125.87
18	Ciwaringin	61.87	58.66	60.36	57.00	52.68	54.97
19	Susukan	107.52	112.45	109.90	93.70	98.11	95.83
20	Gegesik	132.04	136.72	134.23	121.95	125.70	123.71
21	Susukan Lebak	61.19	59.84	60.53	59.18	58.22	58.71
22	Pabedilan	124.27	118.16	121.34	114.44	110.79	112.69
23	Dukupuntang	150.46	152.12	151.26	142.56	144.03	143.27
24	Panguragan	79.33	77.96	78.66	74.00	72.34	73.19
25	Kaliwedi	107.02	94.84	101.18	99.62	87.90	93.99
26	Pangenan	166.27	153.40	159.94	156.12	143.65	149.98
27	Gebang	124.96	118.08	121.54	111.85	103.60	107.75
28	Depok	103.81	104.06	103.93	95.37	95.14	95.26
29	Kedawung	153.85	133.33	143.56	143.01	123.62	133.28
30	Karangwareng	49.02	48.90	48.96	47.42	47.01	47.22
31	Talun	118.81	118.86	118.83	105.76	106.87	106.30
32	Gunung Jati	281.96	285.37	283.63	258.06	261.17	259.58
33	Pasaleman	83.62	80.67	82.19	81.12	76.81	79.04
34	Pabuaran	132.36	135.87	134.05	121.52	121.77	121.64
35	Tengah Tani	110.83	113.46	112.10	102.67	104.83	103.71
36	Plered	124.11	116.35	120.34	110.01	105.52	107.83
37	Gempol	111.29	100.00	105.91	103.17	92.88	98.27
38	Greged	120.31	120.66	120.48	112.28	110.84	111.60
39	Suranenggala	121.80	122.19	121.99	106.79	106.40	106.60
40	Jamblang	113.95	107.05	110.57	104.19	98.73	101.51
	Rata-rata	117.98	116.06	117.05	108.20	106.41	107.33

Sumber Data: Profil Pendidikan 2018/2019

APK/APM SMP

No	KECAMATAN	APK Tingkat SMP Termasuk Paket B			APM Tingkat SMP Termasuk Paket B		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Waled	94.70	108.87	101.36	80.76	91.72	85.91
02	Ciledug	110.18	115.63	112.79	83.06	90.17	86.46
03	Losari	127.50	126.35	126.94	109.72	105.08	107.47
04	Babakan	140.53	163.65	151.54	126.75	152.48	139.00
05	Karang Sembung	89.28	114.28	101.18	87.14	112.29	99.12
06	Lemahabang	176.40	187.58	181.72	147.33	149.68	148.45
07	Sedong	47.43	49.01	48.19	46.15	46.88	46.50
08	Astana Japura	315.39	295.99	305.73	294.73	279.83	287.30
09	Mundu	107.70	112.82	110.21	87.13	91.93	89.49
10	Beber	77.45	73.02	75.29	67.84	63.02	65.49
11	Sumber	247.87	292.64	268.58	179.28	218.30	197.32
12	Palimanan	183.21	189.02	185.95	143.26	144.54	143.86
13	Plumbon	153.50	175.71	163.75	139.79	159.82	149.03
14	Weru	158.39	156.13	157.30	134.35	132.63	133.52
15	Kapetakan	49.30	48.41	48.87	40.01	39.91	39.96
16	Klangenan	55.01	55.41	55.20	48.18	50.63	49.35
17	Arjawinangun	146.29	163.35	154.57	120.84	134.35	127.39
18	Ciwaringin	161.32	173.79	167.16	130.79	141.30	135.72
19	Susukan	73.73	84.41	78.77	68.88	76.85	72.64
20	Gegesik	122.63	131.92	127.21	98.69	101.94	100.29
21	Susukan Lebak	82.87	86.68	84.74	75.56	76.44	75.99
22	Pabedilan	112.03	114.37	113.19	97.96	100.64	99.29

No	KECAMATAN	APK Tingkat PAUD			APK Tingkat TK		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
23	Dukupuntang	222.74	194.08	208.51	182.75	153.58	168.28
24	Panguragan	70.42	64.72	67.59	61.26	54.35	57.83
25	Kaliwedi	88.82	116.24	102.39	84.29	111.61	97.81
26	Pangenan	205.56	170.52	187.44	185.95	152.73	168.77
27	Gebang	87.08	81.93	84.69	72.09	64.19	68.43
28	Depok	83.64	82.09	82.89	70.09	68.33	69.23
29	Kedawung	91.16	98.05	94.44	64.74	65.76	65.23
30	Karangwareng	33.40	27.90	30.70	28.71	24.42	26.60
31	Talun	60.04	64.61	62.24	53.26	55.66	54.41
32	Gunung Jati	275.08	295.31	284.86	233.70	238.69	236.11
33	Pasaleman	56.39	60.87	58.51	38.43	44.88	41.49
34	Pabuaran	108.90	75.32	92.48	89.26	62.02	75.94
35	Tengah Tani	103.09	134.50	117.60	91.66	122.38	105.85
36	Plered	82.78	88.70	85.55	69.84	75.55	72.51
37	Gempol	93.79	87.44	90.68	87.29	78.48	82.98
38	Greged	78.12	88.70	83.33	75.27	84.17	79.65
39	Suranenggala	98.37	109.85	103.99	75.08	83.69	79.29
40	Jamblang	82.09	92.61	87.26	67.12	76.55	71.76
	Rata-rata	112.71	117.62	115.08	95.70	99.34	97.46

Sumber Data: Profil Pendidikan 2018/2019

Angka Melek Huruf (AMH)

PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KEMAMPUAN BACA TULIS DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN CIREBON (HASIL SURVEI IPM TH 2015)

Laki-laki+Perempuan

No	Kecamatan	Kuantitas			Persentase		
		Bisa Baca	Tidak Bisa Baca	Jumlah	Bisa Baca	Tidak Bisa Baca	Jumlah
		N	N	N	%	%	%
1	010 WALED	38,339	3,066	41,405	92.60	7.40	100.00
2	011 PASALEMAN	17,479	2,118	19,597	89.19	10.81	100.00
3	020 CILEDUG	32,138	913	33,051	97.24	2.76	100.00
4	021 PABUARAN	25,321	1,563	26,884	94.19	5.81	100.00
5	030 LOSARI	38,114	3,326	41,440	91.97	8.03	100.00
6	031 PABEDILAN	36,236	3,961	40,197	90.15	9.85	100.00
7	040 BABAKAN	44,162	4,374	48,536	90.99	9.01	100.00
8	041 GEBANG	39,752	5,003	44,755	88.82	11.18	100.00
9	KARANGSEMBUNG	26,638	646	27,284	97.63	2.37	100.00
10	051 KARANGWARENG	20,721	631	21,352	97.04	2.96	100.00
11	060 LEMAHABANG	38,290	1,192	39,482	96.98	3.02	100.00
12	061 SUSUKAN LEBAK	28,184	580	28,764	97.98	2.02	100.00
13	070 SEDONG	29,993	967	30,960	96.88	3.12	100.00
14	080 ASTANAJAPURA	54,048	3,584	57,632	93.78	6.22	100.00
15	081 PANGENAN	30,971	2,491	33,462	92.56	7.44	100.00
16	090 MUNDU	53,085	3,351	56,436	94.06	5.94	100.00
17	100 BEBER	26,558	497	27,055	98.16	1.84	100.00
18	101 GREGED	35,165	3,043	38,208	92.04	7.96	100.00
19	111 TALUN	48,337	858	49,195	98.26	1.74	100.00
20	120 SUMBER	61,841	1,586	63,427	97.50	2.50	100.00
21	121 DUKUPUNTANG	47,003	697	47,700	98.54	1.46	100.00
22	130 PALIMANAN	41,335	1,919	43,254	95.56	4.44	100.00
23	140 PLUMBON	57,614	1,466	59,080	97.52	2.48	100.00
24	141 DEPOK	43,461	1,447	44,908	96.78	3.22	100.00
25	150 WERU	51,247	495	51,742	99.04	0.96	100.00
26	151 PLERED	39,321	842	40,163	97.90	2.10	100.00
27	161 TENGAH TANI	31,304	416	31,720	98.69	1.31	100.00
28	162 KEDAWUNG	50,550	467	51,017	99.08	0.92	100.00
29	171 GUNUNGJATI	56,091	5,645	61,736	90.86	9.14	100.00
30	180 KAPETAKAN	32,503	6,008	38,511	84.40	15.60	100.00
31	181 SURANENGGALA	29,008	3,383	32,391	89.56	10.44	100.00
32	190 KLANGENAN	38,303	2,538	40,841	93.79	6.21	100.00
33	191 JAMBLANG	26,100	1,901	28,001	93.21	6.79	100.00
34	200 ARJAWINANGUN	47,001	1,656	48,657	96.60	3.40	100.00
35	201 PANGURAGAN	30,271	3,201	33,472	90.44	9.56	100.00
36	210 CIWARINGIN	28,001	1,956	29,957	93.47	6.53	100.00
37	211 GEMPOL	31,198	2,607	33,805	92.29	7.71	100.00
38	220 SUSUKAN	43,068	5,609	48,677	88.48	11.52	100.00
39	230 GEGESIK	48,093	7,121	55,214	87.10	12.90	100.00
40	231 KALIWEDI	25,552	2,831	28,383	90.03	9.97	100.00
Jumlah		1,522,396	95,955	1,618,351	94.07	5.93	100.00

Sumber data: Survey IPM tahun 2015

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Pendidikan

Pendidikan menjadi penentu kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Cirebon adalah rata-rata pendidikan masyarakat masih rendah. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Cirebon masih rendah. Ini menunjukkan tingkat melanjutkan sekolah masih rendah terutama pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar masih belum tuntas. Selain itu, Kabupaten Cirebon masih menyisakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih belum melek huruf. Kemampuan melek huruf merupakan kemampuan dasar untuk menyerap pengetahuan dan ketrampilan. Dari sisi fasilitas gedung sekolah, Kabupaten Cirebon masih menghadapi kondisi ruang kelas yang membutuhkan banyak perbaikan. Sementara, dari aspek ketersediaan tenaga pendidik, Kabupaten Cirebon masih menyisakan tenaga pendidik yang belum layak mengajar terutama dari sisi kualifikasi pendidikan tenaga pendidik serta jumlah pendidik PNS masih belum mencukupi. Berdasarkan uraian di atas, pembangunan daerah untuk mengejar ketertinggalan akan semakin sulit jika pembangunan sumber daya manusia tidak segera dilakukan percepatan perbaikan melalui pembangunan pendidikan.

Permasalahan yang dihadapi

Semakain hari permasalahan pendidikan bukannya semakin berkurang, justru permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan

tuntutan globalisasi segala penjuru kehidupan dimana filter tidak lagi dapat membendung sisi negatif dari seluruh interaksi setiap individu. Secara garis besar permasalahan pendidikan setidaknya dapat diklasifikasikan kedalam 3 pokok masalah sebagaimana uraian dibawah ini.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Pe
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 - 2024

No.	Masalah Pokok	Masalahan	Akar masalah
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.	1 Aksesbilitas Pendidikan masih rendah	1 Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan
		2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan kurang berkompeten	2 Kurang meratanya tingkat profesionalisme guru dalam strategi pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan
		3 Mutu dan jumlah sarana prasarana pendidikan	3 - Kerusakan bangunan sekolah - Kesenjangan fasilitas sarana penunjang pembelajaran
		4 Tata Kelola Pendidikan	4 - Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah - Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah., kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru

3.1.1 Aksesibilitas pendidikan

a) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.
b) Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi di dimasyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan;
c) Belum semua sekolah menerima anak berkebutuhan khusus;
d) Masih terdapat perusahaan/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) tidak mensyaratkan ijazas sebagai syarat diterimanya bekerja;

3.1.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kurang Berkompeten

a) Kurang meratanya tingkat profesionalisme guru dalam strategi pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.
b) Kolaborasi dalam pembaharuan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja;
c) Belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru;

3.1.3 Mutu dan Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan

a) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah;
b) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
c) Terdapat kesenjangan fasilitas sarana penunjang pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium serta media pembelajaran lainnya belum merata pada seluruh sekolah;
d) Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;

e) Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;

3.1.4 Tata Kelola Pendidikan

a) Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
b) Belum tersedia data pendidikan yang akurat disebabkan belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
c) Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah., kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;
d) Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategis dan program tahunan pada tingkat sekolah belum berkembang baik;
e) Proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;
f) Belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatan mutu pengorganisasian yang lebih efektif.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi misi dalam pembangunan Kabupaten Cirebon perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan yang spesifik. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran, dan program-program yang *inherent.* Kebijakan umum tersebut diantaranya**: 1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.**

3.3. Talaahan Rencana Strategis

3.3.1. Analisis lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berpengaruh terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimana di dalamnya mencakup (1) sumberdaya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kekuatan

a). Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon secara efisien dan efektif sehingga dapat berkompetisi di kancah global, hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya beberapa prestasi kejuaraan baik di dalam penguasaan mata peiajaran, seni budaya maupun prestasi olahraga di tingkat Propinsi maupun Nasional.

b) Adanya kesepakatan dari seluruh jajaran pendidikan untuk mendukung visi Kabupaten Cirebon dalam misi 1 "**Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi"**. Implementasi hal tersebut tercermin dalam program dan kegiatan yang selama ini digulirkan serta anggaran pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

c) Tersedianya sumberdaya aparatur pendidik dan kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan di era globalisasi sekarang ini.

d) Tersedianya sarana dan prasarana yang siap untuk dikembangkan guna menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia global, hal ini dapat dilihat dari aset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran, gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, ketersediaan lahan yang senantiasa siap untuk dibangun dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
e) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan bahkan sampai pada tingkat Sekolah dan masyarakat Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan, pengambilan kebijakan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

Kelemahan

a) Belum terbangunnya koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar lini, unit dan institusi pendidikan di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya ego sektoral serta bervariasinya kemampuan SDM aparatur maupun kemampuan daya beli masyarakat yang seringkali menjadi kendala di dalam pembangunan di bidang pendidikan.
b) Belum seragamnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyimpangan terhadap komitmen yang disepakati sehingga menjadi kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan.
c) Belum efektifnya rentang kendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, hal ini disebabkan karena : (a) Penegakkan hukum tidak/kurang tegas; (b) besarnya populasi persekolahan yang harus diawasi; (c) kurangnya keterlibatan aparatur pendidikan yang ada di lapangan dalam

melaksanakan pengawasan; dan (d) kurangnya dukungan dana dan fasilitas operasional.

d) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan, hal ini disebabkan karena: (a) besarnya populasi persekolahan yang tersebar sampai di pelosok desa; (b) kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan; (c) belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi dari tingkat Kabupaten sampai ke sekolah-sekolah sebagai sumber data primer; dan (d) kurangnya dukungan dana operasional dan teknologi sehingga mengakibatkan perencanaan menjadi tidak matang dan pengawasan tidak efektif.

3.3.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi rnempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)* dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan.

Peluang

a) Media massa elektronik maupun cetak yang berskala lokal, regional maupun nasional banyak terdapat di Kabupaten Cirebon, hal ini perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan efektif melalui jalinan kerjasama yang saling menguntungkan.

b) Adanya kepedulian masyarakat, pengusaha terhadap pendidikan dan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat (stakeholders) menyambut penerapan inovasi-inovasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang difasilitasi melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekoiah (MBS), Badan Akreditasi Sekoiah (BAS), *Broad Based Education (BBE) and Life Skill* serta gerakan-gerakan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan mulai dari pembentukan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), kemudian menjadi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), Dewan Pendidikan (DP)/ Dewan Sekoiah, sampai kepada Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP).

c) Posisi geografis Kabupaten Cirebon yang merupakan lintasan antar propinsi-propinsi di Indonesia memiliki nilai strategis untuk menjadi pintu gerbang dan cermin pendidikan bukan hanya pada skala propinsi tapi juga pada skala Nasional. Hai ini menjadi peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara akseleratif dan berkesinambungan.

Tantangan

a) Kabupaten Cirebon sebagai tempat tujuan untuk mencari kerja/nafkah Seiring pertumbuhan dunia industri mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini menjadi tugas berat jajaran pendidikan di Kabupaten Cirebon guna menuntaskan program-program pendidikan, khususnya Rintisan Wajar 12 Tahun karena semakin besarnya populasi penduduk yang harus dilayani.

b) Geografis Kabupaten Cirebon yang cukup luas dan masih terdapat beberapa daerah terpencil. Hal ini telah menyebabkan tidak meratanya penyebaran pelayanan pendidikan sehingga menjadi tantangan berat di dalam melakukan inovasi dan akselerasi pendidikan.

c) Kendala budaya tradisional dan pengaruh negatif budaya luar menimbulkan permasalahan yang kompleks di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon, hal ini menuntut penanganan tersendiri melalui pendekatan-pendekatan khusus agar pembangunan pendidikan bisa berjalan secara sinergis dan serentak. Dalam posisi pendidikan yang merupakan kebutuhan dan perhatian semua orang, menjadi primadona dalam pencapaian IPM 80 serta dibebani dampak reformasi yang kebablasan, mengakibatkan banyak pihak berkeinginan dan memaksakan diri untuk ikut campur mengawasi pelaksanaan pembangunan pendidikan tanpa mau mengerti permasalahan internal kelembagaan. Hal ini menjadi beban berat bagi jajaran pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan secara efisien dan efektif karena terlalu banyak campur tangan pihak luar terhadap pengelolaan pendidikan. Hal ini berdampak besar terhadap aspek psikologis para aparatur di dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan interlan mencaup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi umumnya dapat dikenadalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisi lingkungan Strategis digunakan teknis analisis SWOT (Strength, Weakneess, Opportunity, dan Thereat) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. Setiap PKL dan PKLp mempunyai peran dan fungsi berbeda. Adapun peran dan fungsi masing-masing PKL dan PKLp sebagai berikut:

PKL Ciledug dan PKLp Losari dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Ciledug meliputi Kecamatan Losari (PKLp); Pabedilan; Pabuaran; Waled; Babakan; Gebang; dan Pasaleman

PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Lemahabang meliputi Astanajapura (PKLp); Mundu; Pangenan; Sedong; Susukanlebak; Karangsembung; dan Karangwareng

PKL Sumber dan PKLp Weru dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan

budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi; Wilayah Pelayanan PKL Sumber meliputi Kecamatan Weru (PKLp); Beber; Greged; Plered; Tengahtani; Talun; Kedawung; dan Gunungjati.

PKL Palimanan dan PKLp Plumbon dengan fungsi utama sebagai sentra industry. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Palimanan meliputi Kecamatan Plumbon (PKLp); Klangenan; Jamblang; Depok; Dukupuntang; dan Gempol.

PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial.

ANALISIS

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi rnempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)* dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

3.5. ISU STRATEGIS

Setelah berakhirnya periode Rencana Strategis Bidang Pendidikan dengan fokus penguatan layanan pendidikan, pada tahapan selanjutnya yakni periode 2019-2024, fokus pembangunan pendidikan pada layanan pendidikan yang berkaitan dengan peserta

didik, pendidik, sarana prasarana serta tatakelola pendidikan jenjang pendidikan pra sekolah, SD dan SMP serta pendidikan non formal. Untuk menentukan langkah penanganan pembangunan pendidikan perlu adanya identifikasi isu strategis yang tepat dan menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Cirebon. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

3.5.1. Melek huruf latin dan Al-Qur'an

Tingkat buta huruf Alquran di Indonesia terbilang tinggi. Hasil riset dari Institut Ilmu Alquran (IIQ) akhir pekan lalu mencatat sekitar 65 persen masyarakat Indonesia buta huruf Alquran. Begitu pula di Kabupaten Cirebon meski jumlah Pesantren tidak sedikit namun tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat melek huruf Al-Qur'an (Huruf arab) masih rendah.

Isu Strategis ini harus menjadi perhatian bagi semua kalangan. Sungguh sangat mengejutkan dan perlu dibahas dalam penyusunan program khususnya institusi terkait serta masyarakat pada umumnya melalui pendidikan informal (didalam), formal (di sekolah) maupun non formal (Pendidikan oleh masyarakat). Peran aktif masyarakat sangat diperlukan seperti melalui Dewan masjid dan lain-lain. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat melek Alquran Kabupaten Cirebon adalah pencanangan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Gemar Mengaji). Program tersebut terinspirasi dari budaya sebagian besar masyarakat Muslim tempo dulu, yang kerap melakukan amalan tadarus Al Qur'an tiap ba'da shalat Maghrib.

Kemiskinan dan kebodohan ibarat lingkaran setan yang tak berujung pangkal. Beruntung di Kabupaten Cirebon hanya sekitar 10% masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Namun demikian bukan berarti berbanding lurus dengan tingkat melek huruf latin. Masih ada sebagian pendududuk yang masih belum melek huruf dikarenakan himpitan ekonomi memaksa mereka lebih

mementingkanusaha pemenuhan kebutuhan hidup daripada peningkatan sumberdaya manusia.

Selain itu sebagian besar dari mereka sudah termasuk usia lansia sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran disamping mereka menganggap bahwa melek huruf tidak merupakan kebutuhan inti untuk menjalani kehidupannya.

3.5.2. Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Menjadi seorang guru tidaklah mudah. Tidak semua orang bisa menjadi guru, karena guru saat ini haruslah memiliki standar kompetensi yang dapat menjadikan dunia pendidikan lebih bermutu dan berkualitas. Belum semua guru memiliki seluruh standar kompetensi. Hal ini akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan dan jika kondisi ini tetap berlangsung maka kondisi mutu pendidikan lama kelamaan akan menjadi terpuruk. Standar kompetensi dimaksud adalah:

- **Kompetensi Pedagogik** merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun kompetensi pedagogik meliputi: Mengenal anak didiknya, menguasai teori-teori tentang pendidikan, bahan pelajaran, macam-macam teknik dan metode pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran

- **Kompetensi Kepribadian** ialah kemampuan individu atau personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, bijaksana, dewasa, berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya serta memiliki akhlak yang mulia. Kompetensi kepribadian ini berkemampuan dalam mengaktualisasikan diri sebagai pendidik yang

disiplin, jujur, berwawasan luas, bertanggung jawab dan dapat menjadi sumber inspirasi posirif bagi para peserta didiknya.

- **Kompetensi Sosial** ialah kemampuan guru dalam melakukan komunikasi baik lisan, tulisan maupun perbuatan kepada peserta didik, tenaga-tenaga kependidikan, wali murid, maupun masyarakat sekitar dengan cara yang efektif, ramah atau santun dan sesuai dengan adat dan norma yang berlaku. Selain itu, dalam kompetensi sosial ini, guru mampu bekerjasama dan beradaptasi dengan keanekaragaman suku dan budaya di tempat melaksanakannya tugas.

- **Kompetensi Profesional** merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembalajaran secara mendalam dan luas. Tidak hanya penguasaan materi pelajaran saja, namun juga penguasaan terhadap materi-materi kurikulum yang berlaku, konsep dan struktur keilmuan, masalah-masalah pendidikan dan wawasan yang memadai terhadap materi-materi yang bersangkutan.

3.5.3. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Cirebon masih belum terpenuhi atau belum memenuhi SPM Pendidikan. Selain itu kondisinya sudah banyak yang rusak dimakan usia dan diperparah dengan pendistribusiannya yang belum merata.

Mestinya salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak

langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga di dukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya saja sekolah yang berada di kota yang sudah memiliki faslitas laboratorium komputer, maka anak didiknya secara langsung dapat belajar komputer sedangkan sekolah yang berada di desa tidak memiliki fasilitas itu dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan komputer kecuali mereka mengambil kursus di luar sekolah.

3.5.4. Manajeman Pengelolaan Pendidikan

Tidak ada perbuatan yang sempurna, begitupun tidak ada perbuatan positif yang sia-sia. Sama halnya dengan upaya peningkatan tatakelola pendidikan di Kabupaten Cirebon, meski terus menerus diadakan perbaikan namun kekurangan masih tetap ada baik penyebabnya dari internal maupun eksternal. Dana pendidikan misalnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditetapkan 20% namun Pemerintah Kabupaten belum mampu merealisasikannya. Ada yang beranggapan bahwa sekolah dijadikan ladang bisnis dan sebagainaya.

Penerapan tata kelola yang baik membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan, diantaranya:

1. Mampu memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah, yaitu masyarakat, agar ikut berperan optimal sehingga tercipta sinergi antara lembaga pendidikan dengan stakeholdernya.

2. Penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik memberikan nilai-nilai, seperti nilai keadilan, efisiensi, dan daya tanggap, yang mendorong lembaga pendidikan maupun Pemerintah lebih efektif dalam bekerja tanpa mengabaikan orientasi pada kebutuhan pelanggan pendidikan.
3. Tata kelola kepemerintahan yang baik memberikan kondisi bersih dari korupsi yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekelompok orang atau golongan.

Untuk pelaksanaan tata kelola yang baik, diperlukan adanya:

1. Komitmen yang kuat baik dari pihak-pihak di dalam lembaga pendidikan tersebut maupun pihak-pihak di luar lembaga pendidikan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat.
2. Koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral tinggi.
3. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata yang berakar pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab.

Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan dapat membangun sebuah sistem anti korupsi dalam institusi pendidikan yang akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa ini.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya ingin meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat. Melalui misinya yaitu ”Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”

upaya yang dilakukan :

4.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta didik

Meningkatkan kuantitas peserta didik adalah upaya secara terus menerus yang dilakukan melalui intensifikasi komunikasi formal maupun informal baik di tataran internal maupun eksternal kedinasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Disamping itu upaya pemerataan dan perluasan akses dengan cara pengembangan model pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk keberhasilan hal tersebut perlu dibangun tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan dan partisipasi dari semua komponen yang ada. Meningkatkan kualitas peserta didik adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus melalui inovasi pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang tinggi ditandai oleh tingkat pencapaian angka kelulusan, rendahnya angka mengulang dan lain - lain.

4.1.2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pembinaan secara terus menerus baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis

pengelolaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja serta memiliki integriras dan kompetensi unggul dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

4.1.3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Memenuhi standar nasional sarana dan prasarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang harus tersedia dalam rangka kegiatan belajar mengajar melaui pembangunan gedung kantor, sekolah, ruang kelas, laboratorium serta ruang penunjang lainnya, alat bantu pembelajaran seperti buku teks pelajaran, alat peraga dan lain-lain baik secara kuantitas maupun kualitas.

4.1.4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tatakelola pendidikan

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang

terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

4.2. SASARAN

4.2.1. Meningkatnya Kemempuan Membaca

Buku sangat berkaitan erat dengan kemampuan membaca. Buku adalah jendela dunia, karena itu, siapa yang suka dan gemar membaca buku, maka pasti pengetahuannya sangat luas, itulah generasi yang diimpikan oleh bangsa ini. hal tersebut akan bisa dilakukan tentunya dengan cara menyediakan buku-buku kontemporer, sebab pantangan saat ini adalah budaya membaca dalam dunia generasi kita masih jarang, terlebih di kabupaten Cirebon belum terdapat toko buku yang lengkap. Generasi akan kaya ilmu ketika didukung oleh persediaan buku yang lengkap. Kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini jangan dijadikan alasan bahwa pengadaan buku tidak diperlukan lagi, sebab ada paradigma yang berbeda.

4.2.2 Meningkatnya Kesempatan dan Pemerataan Perluasan Akses Pendidikan

Sasaran perluasan dan pemerataan Akses Pendidikan merupakan upaya perluasan daya tampung satuan Pendidikan dengan mengacu kepada skala prioritas dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penduduk Kabupaten Cirebon dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda. Selain itu beasisawa transisi, dana Bos sangat menunjang dan meningkatkan perluasan akses ini.

4.2.3 Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan

Sudah merupakan pendapat umum bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas, mutu dan relevansi pendidikan bangsa yang bersangkutan. Bahkan lebih spesifik lagi, bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dewasa ini adalah bangsa-bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumber daya insane. Artinya, melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada pembangunan pendidikan guna pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Begitupun di Kabupaten Cirebon upaya pengembangan sumber daya manusia, dari aspek pendidikan yang berarti mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memilki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Dari aspek kualitas , pengembangan sumber daya manusia berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan diperlukan dalam kehidupannya.

Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan

pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena di isi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yangdi milikinya.

Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembengunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

4.2.4 Meningkatnya Efektifitan dan Efisiensi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

Tabel T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	**Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat**		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	22,44 Prosen	22,58	22,71	22,85	22,99
1.1.1.		Meningkatnya kemampuan membaca	Angka Melek Huruf	96,00 Prosen	96,58	97,16	97,74	98,32
			Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa SD	76,00 Prosen	76,46	76,91	77,38	77,84
			Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa SMP	59,50 Prosen	63,30	67,10	70,90	74,70
1.1.2.		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,78 Prosen	6,88	6,98	7,08	7,18
1.1.3.		Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,52 Prosen	12,67	12,82	12,97	13,12
1.1.4.		Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	Manajeman Bebasisa Sekolah	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00
			Indek Kepuasan Masyarakat	78,30 Point	78,35	78,42	78,45	78,50
			Harapan Lama Sekolah	0,00 Prosen	0,00	0,00	0,00	0,00

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (1.01.01.) Hal. 1 / 2

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2019—2024 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2018. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development.*

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2019--2024 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keterjangkauan atau pendanaan, pembelajaran dan penilaian, dan tata kelola manajemen pendidikan.

5.1. STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga

kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu.

5.1.1. Peningkatan akses layanan pendidikan

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Untuk merealisasikannya maka Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon membangun strategi pelayanan untuk pendidikan jalur formal/non formal sebagai berikut.

a) Penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan guru TK, SD, SMP, serta tutor Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten;
b) Penyediaan manajemen TK, SD, SMP, SMA, SMK serta Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;
c) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu, serta keterlaksanaan akreditasi;
d) Penyediaan dana BOS serta subsidi lainnya untuk meningkatkan keterjangkauan layanan.

5.1.1 Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru kelas mengampu mata pelajaran untuk satu rombongan belajar, sedangkan guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Guru tersebut wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

Apabila diamati secara seksama, guru negeri (PNS) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada jenjang TK, SD, SMP terdapat kekurangan. Selain itu tidak meratanya sebaran guru menambah parah gap antara sekolah yang satu dengan lainnya.

Penataan guru mutlak perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan jumlah rombel atau jumlah jam pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan.

Strategi yang dibangun dalam mengatasi kesenjangan jumlah guru adalah dengan menggunakan data Dapodik sebagai basis satu-satunya data dalam seluruh program dan kegiatan. Dari data tersebut dibangun aplikasi yang dapat memcerminkan berapa jumlah rombel dan berapa guru yang ada sehingga diketahui berapa kekurangan guru di sekolah tersebut. Begitu juga untuk jenjang SMP berpa guru mata pelajaran tertentu dibutuhkan disekolah tertentu sehingga Dinas Pendidikan dapat mengambil kebijakan untuk langkah selanjutnya.

Langkah pintas yang dapat dilakukan adalah dengan menunjuk guru honorer untuk memenuhi kekurangan tersebut agar pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya.

Guru berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya tergantung pada bagaimana guru memahami komponen-komponen yang terkait langsung dengan proses pembelajaran itu sendidri diantaranya:

a) Tujuan Pembelajaran

Langkah pertama proses belajar mengajar ialah penentu tujuan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai siswa setelah menyelesaikan suatu konsep pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran umum telah ditulis dalam Garis-Baris Besar Program Pengajaran (GBPP). Komponen tujuan pembelajaran adalah suatu tahap kegiatan belajar mengajar yang turut memecahkan problem pengajaran.

b) Murid

Murid adalah orang yang melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Murid dalam suatu kelompok harus memiliki karakteristik yang relatif sama. Untuk penentuan karakteristik lazim digunakan empat teknik penentukan karakteristik siswa, mengkaji dokumen, tes, wawancara, dan observasi.

c) Guru

Guru adalah orang yang menggerakkan suatu proses belajar. Tanpa profesionalisme suatu proses belajar mengajar tidak mungkin mencapai hasil yang baik. Keberadaan guru yang profesional mutlak menjadi dasar pengembangan sistem pembelajaran.

b) Konsep Pembelajaran

Konsep pembelajaran mengandung berbagai materi pembelajaran yang harus dikaji warga belajar. Dengan menguasai sejumlah konsep pembelajaran berarti siswa memiliki modal untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Konsep pembelajaran

harus dikembangkan jadi bahan pembelajaran yang memungkinkan warga belajar memperoleh macam-macam materi pembelajaran yakni fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Dengan adanya pengembangan bahan pembelajaran yang teruji memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.

c) Pendekatan/Metode/Teknik

Pendekatan berupa suatu pendapat tentang pengajaran bahasa yang didasari falsafah tentang bahasa dan pengajaran bahasa, seperti pendekatan komunikatif dan pendekatan alamiah. Teknik pembelajaran digunakan untuk mengurutkan setiap langkah kegiatan. Teknik yang dapat digunakan seperti pemberian, penjelasan, diskusi. Pendekatan dan metode maupun teknik merupakan subsistem yang digunakan dalam pembelajaran.

d) Media/Alat peraga

Penyampaian materi pembelajaran memerlukan media suatu alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran disebut media belajar (alat peraga). Alat ini digunakan hanya untuk membantu memperjelas siswa kepada hal-hal yang memang belum jelas. Media membentuk warga belajar terhindar dari verbalisme, karena sesuatu yang dikatakan ditunjukan dengan bendanya atau tiruannya.

e) Evaluasi

Evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) warga belajar setelah mengkaji konsep pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan dapat berupa evaluasi lisan, evaluasi tulisan, dan evaluasi perbuatan. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan pertanyaan tulisan yang di jawab dengan lisan, atau pertanyaan lisan dijawab dengan lisan. Evaluasi tulisan diharapkan warga belajar menjawab dengan tulisan. Evaluasi perbuatan menekankan warga belajar untuk melakukan suatu kegiatan berupa motorik (gerak), seperti mengekpresikan

suatu adegan bagian drama, menunjukkan perilaku senang/susah/sedih, dan sebagainya.

5.1.3 Peningkatan infrastruktur Pendidikan

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki infrastruktur/sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Satu Desa/Kelurahan dilayani minimal satu satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), serta dalam satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SD dengan 6 Rombngan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.340 m2, sedangkan luas bangunan minimal 400 m2.

Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP yang dapat menampung semua lulusan SD di kecamatan tersebut serta satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP

dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SMP dengan 3 Rombngan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.440 m2, semakin banyak jumlah rombel semakin bertambah luas lahan yang mesti disediakan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan luas bangunan minimal 430 m2 untuk bangunan lantai satu, dan semakin besar jumlah rombel semakin luas pula bangunan yang mesti disediakan.

5.1.4 Peningkatan layanan tatakelola pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah penting dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data siswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu direalisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

Layanan data dan informasi adalah bagian yang tak kalah pentingnya bagi terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien diantaranya melalui proses kolekting data, pengolahan data, produksi data dan pendayagunaan data. Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi, proses tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara manual, tetapi mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi melalui pembangunan sistem layanan data dan informasi serta meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Dinas Pendidikan sehingga sistem layanan tersebut teraji dengan sempurna sesuai harapan.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

5.2.1 Perluasan jaminan akses dan fasilitasi pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasan Serta Pendidikan Non Formal

Pemerataan pendidikan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Program *Education for All* (Pendidikan Untuk Semua/PUS) menghendaki tidak ada seorang pun masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dan sistem rekrutmen peserta didik harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat pada setiap jenjang dan jalur pendidikan serta tidak mempersulit dan memberatkan masyarakat.

Disamping itu perlu dibangun pelayanan pendidikan yang dapat dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan msyarakat terkait dengan beberapa hal seperti biaya, waktu dan tempat penyelenggaraan, serta sistem informasi yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan.

Sosialisasi berbagai model pelayanan pendidikan harus menyentuh langsung pada sasaran tidak hanya dilakukan oleh pengelola pendidikan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan sehingga tercpta jalur – jalur strategis memperoleh pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. ebijakan pemenuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan adalah salah satu faktor penentu bagi semua jalur dan jenjang pendidikan dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menjangkau sampai kedaerah terpencil sekalipun.

5.2.2 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pendidikan

Kualitas/Mutu guru adalah hal yang tak dapat dipisahkan dalam kegiatan pelayanan pendidikan, tidak jarang harapan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui bangku pendidikan adalah jalan satu-satunya yang dipercaya dapat mewarnai keberhasilan dalam berbagai kesempatan memperoleh pekerjaan.

Namun demikian peningkatan mutu guru masih terus harus dipacu mengingat masih rendahnya mutu tenaga pendidik ditandai dengan rendahnya nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) serta tanda bukti kelulusan / izazah siswa tidak dijadikan barometer oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Berijazah atau tidak bagi DUDI adalah sama saja, tidak ada perbedaan, akibatnya sebagian orang berpendapat bahwa sekolah hanyalah perbuatan sia-sia, membuang waktu dan kesempatan karena dengan menempuh pendidikan tidak memiliki dampak yang signifikant terhadap dirinya.

Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan teknis seperti pelaksanaan MGMP dan sejenisnya serta pelatihan yang diberikan langsung terhadap peserta didik perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dengan melibatkan nara sumber yang berkompeten sehingga secara bertahap dapat meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing untuk dapat menapaki pintu gerbang globalisasi.

5.2.3 Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Memanfaatka Dana APBN, APBD Serta Dana Lain yang Syah.

Untuk mencapai ujuan pembelajaran diperlukan sarana prasarana yang memadai. Sehebat apapun guru mengajar bila tidak ditunjang dengan sarana prasarana maka hasilnya dipastikan tidak akan memuaskan.

Untuk kepentingan tersebut Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan dana agar kekurangan ruang kelas dan ruang penunjang lainnya (RPL) serta alat peraga pendidikan terpenuhi, agar ruang kelas dan RPL dalam kondisi baik serta terpenuhinya

kebutuhan prasaranya. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran maka kebutuhan tersebut belum dapat tercukupi.
Untuk memenuhinya Pemerintah Kabupaten Cirebon mengusulkan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, memberdayakan komite sekolah, memanfaatkan dana dari masyarakat seperti alumni, tokoh masyarakat, CSR serta dana lain yang syah.

5.2.4 Pengelolaan Pendidikan Melibatkan Masyarakat Peduli Pendidikan Sesuai Kewenangannya

Peranserta masyarakat diwujudkan dengan dibentuknya komite sekolah pada setiap satuan pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas pendidikan dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Upaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat diwujudkan melalui sosialisasi, pembinaan komite sokolah, forum masyarakat peduli pendidikan serta kegiatan lain yang memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang peran masyarakat dan komite sekolah dalampengelolaan pendidikan.

Selain itu dalam rangka kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran diperlukan pula pera msyarakat secara umum untuk bersama-sama mengawasi dan mengawal dalam membentuk anak bangsa yang cerdas dan berahlak mulia.

Tabel T.C26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN			
MISI 1:	**Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Peningkatan akses layanan pendidikan	Peluasan jaminan akses dan fasilitas pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar serta Pendidikan Non Formal
	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Peningkatan infrastruktur pendidikan	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan memanfaatkan APBN, APBD serta dana lain yang syah.
		Peningkatan layanan tatakelola pendidikan	Pengelolaan pendidikan melibatkan masyarakat peduli pendidikan sesuai kewenangannya.
		Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik	Peningkatan kualitas SDM bidang Pendidikan

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Hal. 1 / 1

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

Pembangunan manusia kian mendapat perhatian dari penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah. Indikasinya, pembangunan manusia dimanifestasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia atau IPM.

Adanya target IPM dalam rencana pembangunan selayaknya disambut positif karena IPM merupakan gambaran tingkat kemampuan sumber daya manusia yang terukur. Target IPM harus obyektif dan rasional. Indikator yang mendasari IPM perlu diupayakan secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga target yang telah dicanangkan dapat tercapai.

Untuk mencapai target tersebut dapat dilihat pada tabel indikator kinerja Dinas Pendidikan dibawah ini.

VISI MISI TUJUAN SASARAN TAHUN 2019 – 2024

ISU STRATEGIS

1 Melek huruf Latin dan Al Qur'an
2 Komptensi tenaga pendidik dan kependi- dikan
3 Sumberdaya sarana dan prasarana
4 Kualitas tatakelola pendidikan

VISI : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman

MISI : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat	1. Meningkatnya kemampuan membaca	1. Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan	1. Perluasan jaminan akses dan fasilitasi pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan dasar serta Pendidikan non formal
		2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan		
		3. Meningkatnya mutu dan relefansi pendidikan	2. Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik	2. Peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan
			3. Peningkatan Inprastruktur Pendidikan	3. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan, memanfaatkan APBN, APBD serta dana lain yang syah.
		4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajeman pendidikan	4. Peningkatan layanan tatakelola pendidikan	4. Pengelolaan pendidikan melibatkan masyarakat peduli pendidikan sesuai kewenangannya.

Tabel 7.1.

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat				Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah		$APS = \frac{\text{Jml. Penduduk Usia Sekolah yang masih bersekolah}}{\text{Jml. Penduduk Usia Sekolah}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	BPS dan Diskominfo	22,31	22,44	22,58	22,71	22,85	22,99	22,99	Data awal per Tahun 2015 hasil survey IPM Kecamatan, untuk data penduduk usia 5 tahun ke atas yang bersekolah
	Meningkatnya kemampuan membaca			Angka Melek Huruf		$\frac{\text{Jml. Penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis}}{\text{Jml. Penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	BPS / Infokom	95,55	96	96,58	97,16	97,74	98,32	98,32	Data Non Pendidikan
		18.	**Program Pendidikan Non Formal**	Peningkatan Persentase Masyarkat Melek Aksara	Peningkatan AMH	$\%AMH = \frac{\text{Jml. penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	BPS / Dinkominfo	95,55	96	96,58	97,16	97,74	98,32	98,32	Penuntasan Bebas Buta Aksara
		18.04.	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah Warga Belajar yang telah mengikuti Pendidikan Keaksaraan Dasar tahun 2019 dan warga belajar yang buta aksara. Kegiatan HAI Tk. nasional dan Kegiatan HAI Tk. Provinsi					Warga Belajar		2.250	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	10.250	Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Kegiatan HAI Tk. nasional dan Kegiatan HAI Tk. Provinsi
		18.08.	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) di Kab. Cirebon					Unit		0	40	40	40	40	40	200	Pembentukan TBM di Kabupaten Cirebon
	Meningkatnya kemampuan membaca			Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa		$\frac{\text{Jml. Siswa SD yang bisa baca menulis huruf Al Qur'an}}{\text{Jml. Seluruh Siswa SD}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	76	76	76,46	76,91	77,38	77,84	77,84	Data Non Pendidikan
		23.	**Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan**	Angka Melek Huruf Al Qur'an jenjang SD		$\%AMH\ Al\ Qur'an = \frac{\text{Jml. Siswa SD yang dapat baca tulis huruf Al Qur'an}}{\text{Jml. Seluruh Siswa SD}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	76	76	76,46	76,91	77,38	77,84	77,84	Penuntasan Buta Aksara Al Qur'an
				Angka Melek Huruf Al Qur'an SMP		$\%AMH\ Al\ Qur'an = \frac{\text{Jml. Siswa SMP yang dapat baca tulis huruf Al Qur'an}}{\text{Jml. Seluruh Siswa SMP}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	55,7	59,5	63,3	67,1	70,9	74,7	74,7	Bebas Buta Huruf A; Qur'an

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		23.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan	Sertifikat bukti bisa dan mampu baca tulis Al Qur'an					Eksemplar		33.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	Pembelajaran baca dan tulis huruf Al Qur'an sesuai dengan makhraj dan tajwidnya
		23.08.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan untuk Baca Tulis Al-Qu'ran Siswa SMP	Sertifikat bukti bisa dan mampu baca tulis Al Qur'an					Eksemplar		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	Pembelajaran baca dan tulis huruf Al Qur'an sesuai dengan makhraj dan tajwidnya
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan			Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		$\%RLS = \frac{\text{Jml. Penduduk usia > 15 Th X Lama Pendidikan yang dihabiskan*)}}{\text{Jml. Penduduk > 15 Th Yang sedang bersekolah atau telah berijazah **)}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	6,68	6,78	6,88	6,98	7,08	7,18	7,18	Pemerataan Pendidikan
		15.	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	Angka partisipasi kasar		$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/ RA/ Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	67	68	68,41	68,82	69,23	69,65	69,65	Mewujudkan pemerataan, perluasan akses pendidikan yang berkeadilan
		15.01.	Pembangunan gedung sekolah	Unit Gedung Sekolah Baru	Pemerataan akses pendidikan				Unit		16	2	2	2	2	2	10	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan PAUD
		15.15.	Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Buku Referensi dan Raport	Menunjang capaian SPM bidang pendidikan				Paket / Exemplar		1	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	115.000	Pengadaan Buku Referensi dan Raport Pendidikan
		15.57.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Juara I, II, III Lomba Guru TK, Pengawas TK, dan Kepala TK Berprestasi Tingkat Kabupaten	Meningkatnya motivsi dan kompetensi guru dalam memenuhi SNP PAUD				Paket Kegiatan		1	1	1	1	1	1	5	Penyelenggaraan Lomba Guru TK, Pengawas TK, dan Kepala TK Berprestasi Tingkat Kabupaten
		15.59.	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Lembaga PAUD					Lembaga		700	750	750	750	750	750	3.750	Pengembangan penyelenggaran Lembaga PAUD
				Lembaga Penyelenggara PAUD					Lembaga		750	750	750	750	750	750	3.750	Pengembangan lembaga penyelenggara PAUD
		15.62.	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Sertifikat Peserta Bimtek Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	Bimbingan teknis tehadap para guru PAUD dalam penerapan Kurikulum dan Model Pembelajarn				Eksemplar		410	500	500	500	500	500	2.500	Peserta Bimtek mendapatkan Sertifikat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		15.64.	Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini	Dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan PAUD					Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Dokumen Perencanaan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pendidikan
		15.65.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Jumlah Peserta sosialisasi Program Bantuan Operasional Pendidikan PAUD terhadap Kepala Sekolah TK/PAUD					Orang		750	750	750	750	750	750	3.750	Menyampaikan informasi terkait pendidikan anak usia dini
		15.67.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	Penyediaan Dana Bantuan Operasional TK/{AUD	Penunjang biaya operasional pendidikan pada TK Negeri				Unit		16	16	18	20	22	24	100	Lembaga pendidikan pra sekolah TK Negeri
		15.81.	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Persiapan sekolah yang akan diakreditasi	Persiapan pelaksanaan akreditasi lembaga TK/PAUD				Dokumen		380	380	380	380	380	380	1.900	Akreditasi Sekolah PAUD/TK
		15.82.	Apresiasi Lembaga dan Gugus	Jumlah Lembaga PAUD dan Gugus PAUD Berprestasi	Peningkatan manajeman dan tatakelola pendidikan				Lembaga		300	300	300	300	300	300	1.500	Penyelenggaraan berbagai lomba untuk lembaga penyelenggara dan Gugus PAUD
		16.	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun**	Angka partisipasi kasar SD		$\%APK = \frac{Jumlah\ Siswa\ pada\ jenjang\ SD/MI/Paket\ A}{Jumlah\ anak\ usia\ 7\ -\ 12\ Tahun} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	109	100	100	100	100	100	100	Mengetahui tingkat partisifasi masyarakat terhadap pendidikan
				Angka partisipasi kasar SMP		$\%APK = \frac{Jumlah\ Siswa\ pada\ jenjang\ SMP/MTs/Paket\ B}{Jumlah\ anak\ usia\ 13\ -\ 15\ Tahun} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	101,11	100	100	100	100	100	100	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		$\%APM = \frac{Jumlah\ siswa\ usia\ 7 - 12\ Tahun\ dijenjang\ SD/MI/Paket\ A}{Jumlah\ penduduk\ kelompok\ usia\ 7 - 12\ Tahun} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100,6	101,2	101,81	102,42	102,42	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		$\%APM = \frac{Jumlah\ siswa\ usia\ 13 - 15\ Tahun\ dijenjang\ SMP/MTs/Paket\ B}{Jumlah\ penduduk\ kelompok\ usia\ 13 - 15\ Tahun} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinan Pendidikan	98	98,3	98,89	99,48	100,08	100,68	100,68	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
		16.19.	Pengadaan Mebeleur Sekolah SD	Meubelair Sekolah SD					Lokal		108	175	175	175	175	175	875	Peningkatan Mutu kuantitas dan kualitas sarana prasarana Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		16.63.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD	Dokumen Bimtek dan Laporan Hasil Monev BOS					Dokumen		2	2	2	2	2	2	10	Penyelenggaraan Bintek Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Monev Pelaksanaan BOS SD
				Dokumen Bimtek dan Laporan Hasil Monev Pelaksanaan BOS SD					Dokumen		2	2	2	2	2	2	10	Penyelenggaraan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Monev Pelaksanaan BOS SD
		16.92.	Pengadaan Mebeleur Sekolah SMP	Meubaliar Sekolah SMP					Lokal		1	24	24	24	24	24	120	Pengadaan meubelair sekolah dalam pemerataan dan akses pendidikan
		16.94.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	Ruang Kelas Sekolah SMP					Lokal		6	160	160	160	160	160	800	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SMP
		16.95.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	Guru Berprestasi					orang		183	209	209	209	209	209	1.045	Guru berprestasi Tingkat Kabupaten untuk ikut kompetensi pada Tingkat Provinsi
		16.97.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/MI/SMPLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP	Tunjangan penghasil PTK Non PNS					Perses		100	100	100	100	100	100	500	Pemberian tunjangan penghasilan dalam rangka peningkatan mutu kinerja PTK Non PNS
	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan			Harapan Lama Sekolah (HLS)		$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	BPS, Disdik dan Disdukcapil	12,37	12,52	12,67	12,82	12,97	13,12	13,12	Angka Indikator merupakan hasil perhitungan dari BPS
		15.	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik		$RK - Baik = \frac{Jml.\ Ruang\ Kelas\ Baik}{Jml.\ Ruang\ Kelas\ Seluruh} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	60	60,35	60,72	61,09	61,45	61,82	61,82	Mengetahui jumlah Ruang Kelas Sekolah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		15.03.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru	Daya Tampung Peserta Didik				Lokal		0	3	3	3	3	3	15	Peningkatan mutu kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		15.07.	Pembangunan saranan dan prasarana bermain	Tersedianya sarana prasarana bermain					Unit		3	3	3	3	3	3	15	
		15.09.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Bangunan Gedung TK/PAUD yang direhab perkerasan lingkungan taman dan atau pagar sekolah					Lokasi		3	3	3	3	3	3	15	Perkerasan lingkungan taman dan atau pagar sekolah
		15.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Pemasangan Instalasi Listrik dari PLN					Paket		1	1	1	1	1	1	5	Pemasangan baru jaringan kelistrikan pada bangunan sekolah
		15.19.	Pengadaan Mebeleur Sekolah	Meubelair Sekolah					Lokal		1	5	10	10	10	10	45	Pengadaan meubelair sekolah
		15.20.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Alat Peratik dan Peraga Siswa (APE Dalam dan APE Luar)	Menunjang ketersediaan Ruang Kelas Sekolah yang layak untuk KBM				Paket		5	10	10	10	10	10	50	Pengadaan alat peraktik dan peraga siswa untuk menunjang penyelenggaraan KBM
		15.45.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sejumlah Ruang Kelas Sekolah					lokal		1	3	3	3	3	3	15	
		15.58.	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Dokumen model bahan ajar					Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Dokumen model bahan ajar PAUD
		16.	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun**	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts		$\%AM = \frac{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 Tahun}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI		$\%AL = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jml. Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan mutu dan relevansi pedidikan
				Meningkatnya Angka Lulusan SMP		$\%AL = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jml. Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	99,95	99,97	99,98	99,99	100	100,01	100,01	Menunjang capaian Rata-rata Lama Sekolah
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD	Mengetahui keadaan jumlah ruang kelas yang sudah rusak	$RK - Baik = \frac{\text{Jml. Kondisi Ruang Kelas Baik}}{\text{Jml. Seluruh Ruang Kelas}} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	70	70,42	70,84	71,27	71,7	72,13	72,13	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP	Mengetahui jumlah ruang kelas yang sudah rusak	$RK - Baik = \frac{Jml.\ Ruang\ Kelas\ Baik}{Jml.\ Seluruh\ Ruang\ Kelas} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	80	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5	Kondisi Ruang Kelas Baik SMP
		16.01.	Pembangunan gedung sekolah SD	Gedung Sekolah Baru	Pemerataan akses pendidikan				Unit		3	1	1	1	1	1	5	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
		16.03.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	Peningkatan pemerataan dan akses pendidikan				Lokal		15	112	100	100	100	100	512	Peningkatan mutu kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pendidikan
		16.04.	Penambahan ruang guru sekolah SD	Ruang Kerja Guru					Lokal		0	250	250	250	250	250	1.250	Peningkatan mutu kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan
		16.05.	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Ruang Lab dan Praktikum Sekolah					Lokal		0	20	20	20	20	20	100	Peningkatan mutu kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan
		16.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Sarana prasarana lapangan olah raga	Meningkatkan Minat untuk berolahraga dan prestasi di bidang olahraga meningkat				Paket		0	200	200	200	200	200	1.000	Peningkatan mutu kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan
		16.09.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD	Halaman dan lingkungan gedung sekolah terpagar dan tertata rapih					Lokasi		76	76	76	76	76	76	380	Peningkatan mutu kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan
		16.100.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah	Dokumen materi Sosialisasi dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Memberikan bimbingan dan sosialisasi kinerja terhadap kepala sekolah dalam rangka persiapan menuju ke akreditasi lembaga sekolah				Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Persiapan pelaksanaan akreditasi lembaga sekolah
		16.101.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP	Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan UN/US					Sekolah		187	187	187	187	187	187	935	Pelaksanaan Monev Penyelenggaraan UN/US

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		16.107.	Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD	Buku Pelajaran Pokok SD	Mewujudkan peningkatan Mutu pembelajaran				Paket		0	500	500	500	500	500	2.500	Pengadaan buku pelajaran pokok sekolah dasar
		16.108.	Penyediaan Buku Pelajaran untuk SMP	Buku Teks Pelajaran SMP	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran				Paket		0	36.658	36.658	36.658	36.658	36.658	183.290	Penyediaan Buku Pelajaran Pokok Siswa SMP
		16.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah SD	Ruang Pepustakaan Sekolah	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan				Lokal		4	53	53	53	53	53	265	Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah
		16.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD	Sarana Air bersih dan Jamban Sekolah	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sekolah sehat				Sekolah		24	68	68	68	70	70	344	Pembangunan Sarana air bersih, sanitasi dan Jamban Sekolah
		16.15.	Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD	Buku referensi, Buku dan Alat Tulis Siswa dan Raport Siswa					Paket		1	1	1	1	1	1	5	Pengadaan buku referensi dan buku laporan Pendidikan
		16.18.	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Alat Peraktik dan Peraga Pendidikan					Paket		115	115	115	115	115	115	575	Peningkatan mutu pembelajaran
		16.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah SD	Pengadaan Sarana Prasarana TIK					Paket		0	136	136	136	136	136	680	Pengadaan Sarana Prasarana Pembelajaran TIK
		16.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah	Ruang Guru Sekolah Dasar	Ruang Guru pada SD Negeri banyak yang tidak layak guna				Lokal		0	3	3	3	3	3	15	Rehabilitasi Ruang Guru pada SD
		16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD	Ruang Kelas Sekolah SD					Lokal		46	400	450	450	450	450	2.200	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
		16.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Ruang Guru pada SMP Negeri	Rehabilitasi Ruang Guru yang tidak layak guna				Unit		0	18	20	20	20	20	98	Rehabilitasi Ruang Guru yang tidak layak guna
		16.46.	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Ruang Laboratorium Sekolah	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran				lokal		20	20	20	20	20	20	100	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
		16.49.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	Sarana Olah Raga Sekolah	Mencetak prestasi bakat dan minat siswa				Paket		3	3	3	3	3	3	15	Rehabilitasi Sarana olah raga pada sekolah SMP
		16.54.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Ruang Sarana Membaca Bagi Siswa	Menunjang budaya baca terhadap siswa				Lokal		18	50	50	50	50	50	250	Penyediaan saran penunjang budaya baca terhadap siswa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		16.57.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD	Juara I, II, dan III Guru SD Berprestasi	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran				Orang		9	9	9	9	9	9	45	Penyelenggaraan kompetensi Guru Berprestasi jenjang Sekolah Dasar
		16.59.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Guru peserta pelatihan mendapat sertifikat	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran				orang		250	250	250	250	250	250	1.250	
		16.61.	Pembinaan SMP Terbuka	Jumah selakolah penyelenggaraan SMP Terbuka	Meningkatkan angka lulusan SMP				Sekolah		17	17	17	17	17	17	85	Penyelenggaraan SMP Terbuka
		16.66.	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	Dokumen Pemetaan Mutu Sekolah	Menunjang terwujudnya mutu pembelajaran				Sekolah		3	5	7	9	10	12	43	Pengembangan Sekolah Model
		16.67.	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Warga Belajar Paket A setara SD	Menunjang peningkatan angka lulusan				Warga Belajar		2.000	254	254	254	254	254	1.270	Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A Setara SD
		16.68.	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Lulusan Warga Belajar Kesetaraan Paket B Setara SMP	Menunjang peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah				Orang		2.500	1.250	1.284	1.300	1.400	1.500	6.734	Peserta warga belajar kesetaraan Paket B Setara SMP
		16.69.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD	Juara Lomba Gugus dan Perpustakaan	Peningkatan Mutu tatakelola manajeman pendidikan				orang		6	6	6	6	6	6	30	Penyelenggaaraan Lomba Gugus SD dan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah
		16.70.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar	Lomba OSN, O2SN , FLSN, Calistung dan Pasanggiri					Cabang Lomba		55	55	55	55	55	55	275	Penyelenggaraan Lomba OSN, O2SN , FLSN, Calistung dan Pasanggiri Bahasa
		16.72.	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peserta Bimtek Guru TIK					orang		150	500	500	500	500	500	2.500	Penyelenggaraan Bimtek Guru Mapel TIK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		16.73.	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Peserta Sosialisasi penyelenggaran pendidikan sekolah dasar					orang		561	561	561	561	561	561	2.805	Sosialisasi berbagai informasi tentang penyelenggaran pendidikan sekolah dasar
		16.75.	Penyediaan Beasiswa Transisi	Jumlah siswa tidak mempu Penerima Beasiswa					orang		265	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	Penyediaan beasiswa penanggulangan angka drof out SMP
		16.76.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Dokumen materi Sosialisasi dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah					Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Bimbingan dan Sosialisasi penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
		16.78.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Hasil Monev UN/US Sekolah Dasar					Sekolah		928	928	928	928	928	928	4.640	Pelaksanaan Monitoring dan pemantauan pelaksanaan UN/US pada jenjang Sekolah Dasar
		16.79.	Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil	Guru SD di Daerah Terpencil penerima tunjangan	Menunjang peningkatan mutu pembelajaran				orang		7	48	48	48	48	48	240	Pemberian tunjang kesejahteraan guru SD daerah terpencil
		16.80.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil	Guru Non PNS di Daerah Terpencil penerima tunjangan	Menunjang peningkatan mutu pembelajaran				orang		0	31	31	31	31	31	155	Pemberian Honorarium Guru Non PNS di Derah Terpencil
		16.83.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket B Setara SMP	terlaksananya pelatihan kompetensi tutor paket b					orang		100	100	120	130	140	150	640	Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Guru terhadap Tutor Kesetaraan Paket B setara SMP
		16.84.	Bimbingan Teknis Penataan Penilaian Angka Kredit Fungsional	Sertifikat Bimtek Peserta Pelatihan	Menunjang peningkatan mutu pembelajaran				Eksemplar		10.108	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dalam penghitungan angka kredit jabatan fungsional
		16.85.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	Ruang Kelas Sekolah					Lokal		3	80	80	80	80	80	400	Memenuhi kebutuhan daya tampung siswa SMP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		16.87.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Lapangan Parkir SMP	Pagar dan halaman lingkungan gedung sekolah					Lokal		10	10	10	10	10	10	50	Pekerjaan pemagaran dan penataan halaman gedung sekolah
		16.88.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	Ruang Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan sudah tidak layak guna				Unit		0	9	9	9	9	9	45	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah
		16.89.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Jamban Siswa dan Sarana Air bersih					unit		0	400	400	400	400	400	2.000	Pembuatan jamban dan sarana air bersih sekolah
		16.90.	Pengadaan Buku-Buku Alat Tulis Siswa SMP	Buku Referensi, Pengayaan Panduan Pendidikan dan Raport Siswa					Paket		1	1	1	1	1	1	5	Pengadaan Teks Pelajaran, Buku dan Alat Tulis Siswa dan Buku Raport dan Sampul Raport Siswa SMP
		16.91.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Alat peraga dan praktik penunjang KBM					Paket		1	1	1	1	1	1	5	Pengadaan alat peraga dan praktik penunjang peningkatan mutu pembelajaran
		16.93.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP	Perlengkapan sarana dan prasarana kebersihan sekolah					Unit		0	160	160	160	160	160	800	Pengadaan komputer sebagai penunjang peningkatan mutu KBM
		16.96.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Peseta mendapatkan sertifikat					orang		300	300	300	300	300	300	1.500	Penyelenggaraan pelatihan kurulum dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran
		16.99.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	Lomba OSN, O2SN, FLSN, TUB dan Pasanggiri	Mewujudkan peningkatan Mutu pembelajaran				Lomba		55	55	55	55	55	55	275	Penyelenggaraan Lomba FLSN, OSN, O2SN, TUB dan Pasanggiri Bahasan dan Sastra Sunda/Cirebon
		18.	**Program Pendidikan Non Formal**	Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Peningkatan angka lulusan SD sederajat	$AL = \frac{Jml.\ Lulusan}{Jml.\ Siswa\ Kelas\ Tertinggi} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	80	85	90	95	98	98	Menunjang capaian angka RLS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Peningktan Angka Lulusan SMP sederajat	$\%AL = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang kesetaraan Paket B}}{\text{Jml. warga belajar Tk. tertinggi kesetaraan Paket B pada tahun sebelumnya}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	68,09	70	70,04	70,08	71,3	71,7	71,7	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
				Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Peningkatan angka lulusan SMA sederajat	$\%AL = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C}}{\text{Jml. warga belajar Tk. tertinggi kesetaraan Paket B tahun sebelumnya}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	79,68	80	80,5	81	81,4	81,9	81,9	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
				Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan	Peningkatan keahlian SDM	$Jml.\ LKP = Jml.\ Thn\ n + (Jml.\ Thn\ n \times 3\%)$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	68	70	72	75	78	80	80	Peningkatan mutu dan kualitas SDM
				Peningkatan jumlah lulusan Warga Belajar Lembaga Kursus dan Pelatihan	Meningkatkan keahlian kecakapan hidup	$\%Lulus = \frac{Jml.\ Lulusan\ LKP}{Jml.\ Warga\ Belajar\ LKP} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	
		18.01.	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan	Pengembangan mutu dalam penyelenggaraan LKP				orang		80	100	100	100	100	100	500	Penyelenggaraan Bimtek Tutor Penyelenggaraan LKP
		18.03.	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Jumlah Tutor LKP Berprestasi					Kategori		26	26	26	26	26	26	130	Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan LKP
				Terselenggaranya Ekspo Pendidikan Masyarakat					Kegiatan		1	1	1	1	1	1	5	Penyelenggaraan Ekspo Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat
		18.05.	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah Peserta Bimtek Life Skill	Bimtek kepada penyelenggaran (Ketua Lembaga)				Orang		350	350	350	350	350	350	1.750	Penyelenggaraan Bimtek life skill sebagai kelanjutan dari program KF
		18.06.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Jumlah Buku Modul Pembelajaran Paket B	sebagai penunjang SPM bidang Pendidikan				Paket		0	1	1	1	1	1	5	Penyediaan Modul Pembelajaran untuk Warga Belajar Kesetaraan Paket B
				Jumlah Modul Pembelajaran Paket C	Penunjang SPM Bidang Pendidikan				Paket		0	1	1	1	1	1	5	Penyediaan Modul Pembelajaran Warga Belajar Kesetaraan Paket C

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Buku Modul Pembelajaran Paket A	Penunjang SPM Bidang Pendidikan				Paket		0	1	1	1	1	1	5	Penyediaan Modul Pembelajaran Paket A setara SD
		18.09.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah Peserta Bimtek dan Workshof Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar mendapatkan Sertifikat Tutor Paket A	Pengendalian peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan				Orang		86	100	100	100	100	100	500	Peningkatan mutu dan kualitas tutor kesetaraan
				Peserta Bimtek dan Workshof Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar mendapatkan Sertifikat Tutor Paket B					Buah		0	1	1	1	1	1	5	
				Jumlah Peserta Bimtek dan Workshof Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar Tutor Paket C					Buah		0	1	1	1	1	1	5	
		18.12.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Peserta Sosialiasasi Pengelola Program UNBK, BOP dan Persiapan Akreditasi Lembaga					Buah		0	1	1	1	1	1	5	
				Sosialiasasi terhadap Pengelola PKBM dan LKP yang belum terakreditasi, Sosialisasi juknis DAK Non Fisik BOP Kesetaraan, dan Sosialisasi Pelaksanaan UNBK					Buah		0	1	1	1	1	1	5	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Peserta Sosialiasasi Pengelola PKBM dan LKP yang belum terakreditasi, Sosialisasi juknis DAK Non Fisik BOP Kesetaraan, dan Sosialisasi Pelaksanaan UNBK					Buah		0	1	1	1	1	1	5	
		18.21.	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Lulusan kesetaraan Paket C setara SMA					orang		1.350	1.350	3.500	3.500	3.500	3.500	15.350	Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMA
		18.22.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket C	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga pendidikan (Tutor) untuk kesetaraan Paket C	Menunjang Peningkatan jumlah angka lulusan SMA				orang		72	100	100	100	100	100	500	Penyelenggaraan pelatihan kompetensi tenaga pendidik kesetaraan Paket C setara SMA
		20.	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD		Guru Layak Mengajar = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	96	97	97,6	98,2	98,8	99,3	99,3	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP		Guru Layak Mengajar = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	97,5	98,2	98,8	99,4	100	100,6	100,6	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV pada jenjang TK/PAUD		%GL = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	72	72,5	72,9	73,4	73,8	74,3	366,9	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
				Penerapan Manajeman Berbasis Sekolah		$MBS = \frac{Jml.\ Sekolah\ Yang\ Menerapkan\ MBS}{Jml.\ Sekolah\ Seluruhnya} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Penerapan Perencanaan Manajeman Berbasis Sekolah
		20.01.	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	- Jumlah Guru Calon Peseta PPG pada Jenjang SD dan Guru Calon Peserta PPG pada Jenjang SMP					Orang		1.500	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	13.800	Penyediaan dana pembiayan PPG Bersertifikat pada jenjang SD dan SMP
		20.03.	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan dan Workshof					orang		160	160	160	160	160	160	800	Penyelenggaraan pelatihan dan workshop standar kompetensi guru SMP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		20.08.	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peserta Bimtek Aplikasi Dapodikdasmen					orang		350	350	350	350	350	350	1.750	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Aplikasi Dapodikdasmen
				Peserta Bimtek Aplikasi Dapodikdasmen					orang		350	350	350	350	350	350	1.750	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Aplikasi Dapodikdasmen
				Peserta Bimtek Aplikasi Dapodikdasmen					orang		350	350	350	350	350	350	1.750	Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis Pengelolaan aplikasi dapodikdasmen
		20.09.	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Verval PTK dan Verval PD	Updating data tenaga pendidik dan kependidikan				orang		350	350	350	350	350	350	1.750	Penyelenggaraan sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Verval PTK dan Verval PD
		20.10.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik	Dokumen Kinerja PGRI terhadap Profesi Pendidik					dokumen		0	1	1	1	1	1	5	Implementasi keterlibatan PGRI dalam peningkatan mutu pendidikan
				Dokumen Capaian Kinerja PGRI terhadap Profesi Pendidik					Buah		0	1	1	1	1	1	5	
				Capaian Kinerja PGRI terhadap Profesi Pendidik					Buah		0	1	1	1	1	1	5	
		20.11.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dokumen Perencanaan					dokumen		2	2	2	2	2	2	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan
		20.15.	Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PTK Terevaluasi					orang		8.767	8.767	8.767	8.767	8.767	8.767	43.835	Penyelenggaraan Persiapan dan pelaksanaan Penilaian Kinerja Terhadap Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Manajeman Bebasisa Sekolah	Menunjang peningkatan tatakelola pendidikan	$MBS = \frac{Jml.\ Sekolah\ Yang\ Menerapan\ MBS}{Jml.\ Sekolah\ yang\ ada} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Disdik	100	100	100	100	100	100	100	Manajeman pengelolaan pendidikan
		18.	**Program Pendidikan Non Formal**	Penerapan Manajeman Berbasis Sekolah	Penataan dan tatakelola manajeman pendidikan	$MBS = \frac{Lembaga\ Pendidikan\ Yang\ Menerapkan\ MBS}{Jml.\ Lembaga\ Pendidikan\ Non\ Formal} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	100	100	100	100	100	100	Mengetahui Lembaga Pendidikan Non Formal yang telah menerakan pengelolaan pendidikan berbasis manajeman sekolah
		18.07.	Pengembangan Data dan Informasi Kelembagaan dan Sarana Keagamaan	Jumlah Data Sarana dan Prasarana PKBM dan LKP	Pendataan Sarana dan Prasarana PKBM dan LPK				Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Penyediaan data pendidikan non formal
		18.20.	Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Masyarakat	Terbentukanya Desa Cerdas di Kabupaten Cirebon	Menunjang program peningkatan mutu pendidikan				Buah		3	3	3	3	3	3	15	Pembentukan Desa Ceradas di Kabupaten Cirebon, melalui lomba Desa Cerda
		22.	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	Standar Pelayanan Minimal		SPM= Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai penimbang Total unsur yang terisi	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	
				Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah		%MBS = Jml. Sekolah Yang Menerapkan MBS X 100 / Jml. Sekolah SD, SMP	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan mutu manajeman pendidikan
		22.07.	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Dokumen Profil Pendidikan					dokumen		2	2	2	2	2	2	10	Penyusunan Dokumen Profil Pendidikan dan Penerbitan Kartu NISN Siswa
				Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Profil Pendidikan	Data merupakan kebutuhan dasar dalam pengambilan kebijakan				dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Pengembangan Sistem Aplikasi Pengolahan data pendidikan
		22.09.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Evaluasi Kinerja	Evaluai dan penilaian capaian kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan pendidikan				dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		22.14.	Fasilitasi Pelayanan Pendidikan	Dokumen Hasil Pelaksanaan PPDB On Line	Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pendidikan				dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru SMP melalui On Line
		22.16.	Penyusunan Capaian Target SPM Bidang Pendidikan	Dokumen Hasil Capaian SPM Bidang Pendidikan					dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Palaksanaan penyusunan dokumen capaian standar pelayanan minimal (SPM)
		22.18.	Kegiatan Expo Pendidikan	Dokumen Laporan Kegiatan					dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Penyelenggaraan Expo / pameran pembangunan bidang Pendidikan
		22.20.	Rapat Koordinasi tentang Pendidikan	Laporan Hasil Pengawasan					dokumen		3	3	3	3	3	3	15	Penyelenggaraan Rapat Persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan pengawas sekolah
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Mutu layanan Pendidikan	$IKM = \frac{Jml.\ Total\ dari\ persepsi\ nilai\ perunsur}{Total\ Nilai\ yang\ terisi} X\ Nilai\ Penimbang$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,42	78,45	78,5	78,5	Peningkatan mutu layanan pendidikan
		01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi} \times Nilai\ penimbang$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
		01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa telepon, listrik dan air	Memenuhi kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi kantor				Unit		42	42	42	42	42	42	210	Memenuhi kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi kantor untuk 42 unit Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan
		01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	STNK Kendaraan Dinas					Unit		278	278	278	278	278	278	1.390	Penyediaan biaya Perizinan Kendaraan Dinas
		01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk operasional pelaksanaan administrasi pada 42 unit Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan				Paket		1.045	1.050	1.075	1.100	1.125	1.150	5.500	Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk 42 unit Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan

web.whatsapp.com • sekarar
Info Dapodikdas SMPN/S

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Memenuhi kebutuhan barang cetak penunjang adm. perkantoran pada 42 unit Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan				Paket		1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	5.225	Penyediaan barang cetak penunjang adm. perkantoran pada 42 unit Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan
		01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik					Unit Kerja		126	126	126	126	126	126	630	Penyediaan Alat-alat Jaringan Kelistrikan untuk 42 unit kerja dilingkunan Dinas Pendidikan
		01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlatan Gedung Kantor					Paket		0	20	20	20	20	20	100	Peralatan Kantor Penunjang Kelancaran Pekerjaan
		01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Behan bacaan Media masa					Eksemplar		12.480	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	64.000	Meningkatkan pengetahuan dan informasi publik
		01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman untuk rapat-rapat kedinasan					Unit Kerja		42	42	42	42	42	42	210	Penyediaan Konsumsi kebutuhan penyelenggaraan rapat-rapat kedinasan
		01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					Unit Kerja		1	1	1	1	1	1	5	Biaya perjalanan dinas ke luar daerah Ibu Kota Provinsi
		01.19.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Dokumen Teknis Tata Kearsipan					Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Dokumen penyelenggaran bimtek dalam penataan arsip
		02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidkan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
		02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor Korwil Pendidikan Kecamatan					Paket		1	1	1	1	1	1	5	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4					Unit		0	2	1	1	1	1	6	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon 2 dan 3
		02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor					Paket Unit		6	6	8	10	10	10	44	Perlengkapan Operasional Gedung Kantor
		02.11.	Sewa Tanah/Gedung	Lahan Tanah Bangunan Gedung Sekolah TK, SD dan SMP dan UPT SKB					Lokal		15	15	15	15	15	15	75	Penyediaan Biaya Sewa Tanah Lahan Gedung Sekolah
		02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor Dinas Pendidikan					Unit		42	42	42	42	42	42	210	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor Dinas
		02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bakar Bakar Kendaraan Dinas					Unit		278	278	278	278	278	278	1.390	Biaya Bahan Bakar dan Perawatan
		02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peratalatan Gedung Kantor					Unit Kerja		42	42	42	42	42	42	210	Penyediaan biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor
		02.29.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	-					Buah		0	1	1	1	1	1	5	
		02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor					Lokal		2	2	2	2	2	2	10	Rehab gedung kantor dinas
		03.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	Peningkatan Kedisplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$JKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} X \text{ Nilai penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakt
		03.01.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-					Buah		0	1	1	1	1	1	5	
		03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-					Buah		1	1	1	1	1	1	5	
		05.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Peningkatan Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$JKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} X \text{ Nilai penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Peningkatan Pelayanan kepada masyakat secara efektif dan efisia

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		05.11.	Peningkatan Pengelolaan Aset	Dokumen Bimbingan teknis pengelolaan aset barang milik daerah					Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Penyelenggaraan Bimbingan teknis pengelolaan aset barang milik daerah
		06.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Laporan Tri Wulan dan Semesteran Realisasi dan Daya Serap Keuangan			Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Penyelenggaraan Laporan Keuangan
		06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen Laporan Daya serap keuangan					Dokumen		3	3	3	3	3	3	15	Penyusunan Laporan Bulanan, Tri Wulan dan Semester daya serap keuangan
		07.	**Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral**	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan perencanaan	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan
		07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	Dokumen Renstra 2019 - 2024					Dokumen		3	2	2	2	2	2	10	Dokumen Renstra 2019 - 2024, Renja dan RKT sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan Perencanaan Pendidikan
		22.	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	Indeks Kepuasan Masyarakat jenjang SD		$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur X Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	79,5	79,55	80,27	80,6	80,99	81,48	81,48	Mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien
				Indek Kepuasan Masyakat pada jenjang SMP		$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur X Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	76,26	77	77,46	77,93	78,39	78,86	78,86	Mewujudkan mutu pelayanan kepada Masyarakat secara efektif dan efisien
		22.04.	Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Dokumen Capaian IKM SD					dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dibidang pendidikan dasar
				Dokumen Capaian IKM SMP					dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Penyusunan capaian Indek Kepuasan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Harapan Lama Sekolah			Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	BPS, Dinas Pendidikan dan Disdukcapil	0	0	0	0	0	0	0	Angka HLS dikeluarkan dari BPS

Sumber, 03 Oktober 2019

BAB VIII
PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Renstra Dinas Pendidikan merupakan arah untuk mewujudkan suatu komitmen dari seluruh pengelola dan pemerhati pendidikan dalam merealisasikan cita-cita masyarakat Kabupaten Cirebon seperti yang tercantum dalam VISI dan MISI yang diimplementasikan dalam rencana program dan kegiatan tahun 2019 - 2024.

Jika Renstra dapat dilaksanakan sesuai tahapannya, maka akan terjadi peningkatan IPM masyarakat Kabupaten Cirebon, hal ini menggambarkan tingkat kemampuan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga diharapkan dapat bersaing dalam era global yang penuh kompetisi dan tantangan.

7.2 SARAN

Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu :

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan mulai dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama
2. Adanya komitmen seluruh jajaran untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian IPM 76,74 di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negative

4. Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan memobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan

Demikian rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian IPM sesuai target pada tahun 2024.

BUPATI CIREBON

I M R O N

4. Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan memobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan

Demikian rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian IPM sesuai target pada tahun 2024.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. ASDULLAH SA, MM.